



2024

(AUDITED)

**LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT SATKER**

**BAWASLU PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Samarinda, 07 Mei 2025
Plh. Kepala Sekretariat
Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur



Yusuf, S.Si., M.A.
NIP. 19700527 199803 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	8
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	10
V. Catatan atas Laporan Keuangan	11
A. Penjelasan Umum	11
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	24
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	47
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	71
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	92
F. Pengungkapan Lainnya	104

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
JL. MT. HARYONO NO. 128 SAMARINDA
TELEPON 0541-7779853, FAXIMILE 0541-7779855

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Samarinda, 07 Mei 2025
Plh. Kepala Sekretariat
Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur



Yusuf, S.Si., M.A.
NIP. 19700527 199803 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Realisasi Pendapatan Negara Per 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.423.479.636,00. Realisasi Belanja Negara Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp277.892.437.265,00 atau mencapai 85,56 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp324.797.989.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp108.319.787.896,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp101.550.616.724,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp6.769.171.172,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.338.805.848,00 dan Rp106.980.982.048,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.275.566,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp276.905.528.238,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp276.903.252.672,00. Surplus

Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp1.552.759.633,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp275.354.343.532,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp128.508.324.322,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp275.354.343.532,00 serta ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp253.813.651.258,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp106.980.982.048,00 dan mengalami penurunan sebanyak Rp21.527.342.274,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA. 2024		% thd Anggaran
		Anggaran	Realisasi	
A. Pendapatan Negara dan Hibah				
I. Pendapatan Perpajakan		0,00	0,00	0,00
1. Pajak Dalam Negeri		0,00	0,00	0,00
2. Pajak Perdagangan Internasional		0,00	0,00	0,00
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0,00	1.423.479.636,00	0,00
1. Pendapatan Sumber Daya Alam		0,00	0,00	0,00
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan		0,00	0,00	0,00
3. Pendapatan BLU		0,00	0,00	0,00
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		0,00	0,00	0,00
III. Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)		0,00	1.423.479.636,00	0,00
B. Belanja Negara	B.2			
I. Belanja Pemerintah Pusat		324.797.989.000,00	277.892.437.265,00	85,56
1. Belanja Pegawai	B.3	13.080.297.000,00	12.162.684.662,00	92,98
2. Belanja Barang	B.4	307.160.430.000,00	261.526.462.603,00	85,14
3. Belanja Modal	B.5	4.557.262.000,00	4.203.290.000,00	92,23
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang		0,00	0,00	0,00
5. Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00
6. Belanja Hibah		0,00	0,00	0,00
7. Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00
8. Belanja Lain-lain		0,00	0,00	0,00
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa				
1. Transfer ke Daerah		0,00	0,00	0,00
a. Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00
1. Dana Transfer Umum		0,00	0,00	0,00
a. Dana Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00
b. Dana Alokasi Umum		0,00	0,00	0,00
2. Dana Transfer Khusus		0,00	0,00	0,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

a. Dana Alokasi Khusus Fisik		0,00	0,00	0,00
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0,00	0,00	0,00
b. Dana Insentif Daerah		0,00	0,00	0,00
c. Dana Keistimewaan DIY		0,00	0,00	0,00
d. Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00
2. Dana Desa		0,00	0,00	0,00
3. Hibah kepada Daerah		0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Negara (B.1 + B.II)		324.797.989.000,00	277.892.437.265,00	85,56
C. Pembiayaan		0,00	0,00	0,00

II. NERACA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 dan 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0,00	52.771.349,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	100.157.989.090,00	122.776.223.044,00
Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)	C.3	980.661.473,00	431.450.000,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.4	406.869.509,00	406.869.509,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.5	(2.034.348,00)	(2.034.348,00)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	C.6	404.835.161,00	404.835.161,00
Persediaan	C.7	7.131.000,00	1.286.676.600,00
Jumlah Aset Lancar		101.550.616.724,00	124.951.956.154,00
Aset Tetap			
Tanah	C.8	562.424.000,00	562.424.000,00
Peralatan dan Mesin	C.9	14.443.167.801,00	11.521.222.293,00
Gedung dan Bangunan	C.10	895.705.000,00	895.705.000,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.11	30.500.000,00	30.500.000,00
Aset Tetap Lainnya	C.12	199.033.900,00	199.033.900,00
Akumulasi Penyusutan	C.13	(9.361.659.529,00)	(9.594.709.299,00)
Jumlah Aset Tetap		6.769.171.172,00	3.614.175.894,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.14	438.664.000,00	438.664.000,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.15	(438.664.000,00)	(423.984.000,00)
Jumlah Aset Lainnya		0,00	14.680.000,00
Jumlah Aset		108.319.787.896,00	128.580.812.048,00
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.16	1.224.509.863,00	19.681.877,00
Uang Muka dari KPPN	C.17	0,00	52.771.349,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.18	114.295.985,00	34.500,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.338.805.848,00	72.487.726,00
Jumlah Kewajiban		1.338.805.848,00	72.487.726,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.19	106.980.982.048,00	128.508.324.322,00
Jumlah Ekuitas		106.980.982.048,00	128.508.324.322,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		108.319.787.896,00	128.508.812.048,00

III. LAPORAN OPERASIONAL
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	2.275.566,00	1.267.267,00
Jumlah Pendapatan		2.275.566,00	1.267.267,00
Beban			
Beban Pegawai	D.2	12.162.684.662,00	8.698.974.660,00
Beban Persediaan	D.3	1.296.230.650,00	27.430.900,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	118.369.632.232,00	67.005.614.996,00
Beban Pemeliharaan	D.5	1.906.456.273,00	1.875.870.407,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	141.855.883.629,00	47.175.374.700,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1.314.640.792,00	1.182.981.300,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	0,00	(10.000,00)
Jumlah Beban		276.905.528.238,00	125.966.236.963,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional		(276.903.252.672,00)	(125.964.969.696,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(3.850.493,00)	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		5.000.000,00	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		8.850.493,00	0,00
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.552.759.633,00	5.978.130,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	D.9	1.548.909.140,00	5.978.130,00
Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa		(275.354.343.532,00)	(125.958.991.566,00)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNBP		0,00	0,00
Beban Luar Biasa		0,00	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) LO	D.11	(275.354.343.532,00)	(125.958.991.566,00)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Ekuitas Awal	E.1	128.508.324.322,00	3.313.659.584,00
Surplus/Defisit LO	E.2	(275.354.343.532,00)	(125.958.991.566,00)
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.3	13.350.000,00	(9.786.894,00)
Penyesuaian Nilai Aset		0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.1	13.350.000,00	(7.786.894,00)
Koreksi Lain-Lain	E.3.2	0,00	(2.000.000,00)
Transaksi Antar Entitas	E.4	253.813.651.258,00	251.163.443.19,008
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E.5	(21.527.342.274,00)	125.194.664.73,008
Ekuitas Akhir	E.6	106.980.982.048,00	128.508.324.322,00

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum dan Profil Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

*Dasar Hukum
dan Profil
Entitas*

1. Dasar Hukum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:
 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. dan pencalonan gubernur;
 3. proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. dan calon gubernur;
 4. penetapan calon gubernur;
 5. pelaksanaan kampanye;
 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 9. proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;

10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang. Pemilu lanjutan. dan Pemilu susulan; dan
11. proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan gubernur;
 - b. mengelola. memelihara. dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;
 - c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;
 - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi. sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
 - h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan

- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

(2) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bawaslu Provinsi dapat:

- a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
- b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

2. Profil Sekretariat Bawaslu Provinsi

Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi dikepalai oleh Kepala Sekretariat yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi membawahi 3 (tiga) Kepala Bagian. yaitu :

- a) Kepala Bagian Administrasi;
- b) Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat;
- c) Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Per 31 Desember 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Timur Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Per 31 Desember 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi. yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto. yaitu dengan membukukan penerimaan bruto. dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi

atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang

yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir. apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset Tetap***b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas. diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah. jalan/irigasi/jaringan. dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus. ketinggalan jaman. tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang. rusak berat. tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR). atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya. dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan

BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan. Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun
--	---------

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar. aset tetap. dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud. tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan. aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan). dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel

masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software/Aplikasi Komputer	4
Lisensi	10

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga. Belanja yang Masih Harus Dibayar. Pendapatan Diterima di Muka. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. yaitu sebesar

nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan. *Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Per 31 Desember 2024 telah dilakukan 19 (sembilan belas) kali revisi yaitu :

1. Revisi ke-01, dengan tanggal revisi 23 Januari 2024;
2. Revisi ke-02, dengan tanggal revisi 01 Februari 2024;
3. Revisi ke-03, dengan tanggal revisi 20 Februari 2024;
4. Revisi ke-04, dengan tanggal revisi 05 Maret 2024;
5. Revisi ke-05, dengan tanggal revisi 26 Maret 2024, DIPA tanggal 30 Mei 2024;
6. Revisi ke-06, dengan tanggal revisi 30 Mei 2024;
7. Revisi ke-07, dengan tanggal revisi 30 Juni 2024;
8. Revisi ke-08, dengan tanggal revisi 30 Juli 2024;
9. Revisi ke-09, dengan tanggal revisi 04 Agustus 2024;
10. Revisi ke-10, dengan tanggal revisi 15 Agustus 2024;
11. Revisi ke-11, dengan tanggal revisi 19 Agustus 2024;
12. Revisi ke-12, dengan tanggal revisi 28 Oktober 2024;
13. Revisi ke-13, dengan tanggal revisi 11 November 2024;
14. Revisi ke-14, dengan tanggal revisi 15 November 2024;
15. Revisi ke-15, dengan tanggal revisi 26 November 2024;
16. Revisi ke-16, dengan tanggal revisi 02 Desember 2024;
17. Revisi ke-17, dengan tanggal revisi 05 Desember 2024;
18. Revisi ke-18, dengan tanggal revisi 27 Desember 2024; dan
19. Revisi ke-19, dengan tanggal revisi 14 Januari 2025.

Revisi anggaran ke-01 merupakan revisi Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pecah pagu per kabupaten/kota.

Revisi anggaran ke-02 merupakan revisi DJA untuk melakukan perbaikan terhadap penyusunan anggaran sebelumnya serta penambahan kegiatan untuk bimtek PTPS dan saksi peserta pemilu, serta automatic adjustment/pencadangan anggaran untuk Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sebesar 952.307.000,00. Perubahan atas revisi tersebut dirincikan sebagai berikut:

Tabel 1. Revisi Anggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur ke-02

Uraian	2024	
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Belanja		
Belanja Pegawai	10.703.294.000,00	10.703.294.000,00

Belanja Barang	135.308.197.000,00	134.948.697.000,00
Belanja Modal	153.000.000,00	512.500.000,00
Jumlah Belanja	146.164.491.000,00	146.164.491.000,00

Revisi anggaran ke-03 merupakan revisi Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pengadaan penambah daya tahan tubuh dari provinsi hingga Ad-hoc (PKD).

Revisi anggaran ke-04 merupakan revisi Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pengadaan piagam penghargaan untuk Ad-Hoc dan revisi kegiatan.

Revisi anggaran ke-05 merupakan revisi DJA untuk melakukan sortir terhadap anggaran yang telah selesai tahapannya dan pengadaan belanja modal yaitu laptop di provinsi dan kabupaten/kota. Perubahan atas revisi tersebut dirincikan sebagai berikut:

Uraian	2024	
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Belanja		
Belanja Pegawai	10.703.294.000,00	10.703.294.000,00
Belanja Barang	134.948.697.000,00	134.855.697.000,00
Belanja Modal	512.500.000,00	605.500.000,00
Jumlah Belanja	146.164.491.000,00	146.164.491.000,00

Revisi anggaran ke-06 merupakan revisi tingkat Kanwil DJPb untuk melakukan revisi halaman III DIPA dan revisi pemutakhiran POK.

Revisi anggaran ke-07 merupakan revisi Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan revisi kegiatan dan operasional (pemeliharaan kendaraan dan keperluan sehari-hari perkantoran).

Revisi anggaran ke-8 merupakan revisi DJA untuk melakukan penginputan dana hibah pada aplikasi SAKTI.

Uraian	2024	
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Belanja		
- Rupiah Murni (RM)		
Belanja Pegawai	10.703.294.000,00	10.703.294.000,00
Belanja Barang	134.948.697.000,00	134.855.697.000,00
Belanja Modal	512.500.000,00	605.500.000,00
Jumlah Belanja	146.164.491.000,00	146.164.491.000,00
- Hibah Langsung Dalam Negeri (HLD)		
Belanja Barang	0,00	227.133.206.000,00
Jumlah Belanja	0,00	227.133.206.000,00
Jumlah Belanja (RM + HLD)	146.164.491.000,00	373.297.697.000,00

Revisi anggaran ke-9 merupakan revisi Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pergeseran anggaran belanja operasional dan belanja modal.

Revisi anggaran ke-10 merupakan revisi Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pergeseran anggaran belanja operasional.

Revisi anggaran ke-11 merupakan revisi tingkat Kanwil DJPb untuk melakukan pendetailan dana hibah dan perbaikan terhadap dana hibah yang telah terinput serta pemutakhiran POK.

Revisi anggaran ke-12 merupakan revisi tingkat Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk pemenuhan kekurangan gaji dan tunjangan serta penambahan belanja modal dengan melakukan optimalisasi pada belanja barang.

Uraian	2024	
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Belanja		
- Rupiah Murni (RM)		
Belanja Pegawai	10.703.294.000,00	13.080.297.000,00
Belanja Barang	134.855.697.000,00	123.722.902.000,00
Belanja Modal	605.500.000,00	4.557.262.000,00
Jumah Belanja	146.164.491.000,00	141.360.461.000,00
- Hibah Langsung Dalam Negeri (HLD)		
Belanja Barang	227.133.206.000,00	227.133.206.000,00
Jumlah Belanja	227.133.206.000,00	227.133.206.000,00
Jumlah Belanja (RM + HLD)	373.297.697.000,00	368.493.667.000,00

Revisi anggaran ke-13 merupakan revisi tingkat Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk penambahan anggaran *medical check-up* dan sewa gedung kantor arsip.

Revisi anggaran ke-14 merupakan revisi Kuasa Pengguna Anggaran untuk penambahan biaya pendidikan dan pelatihan PIM Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas dan Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.

Revisi anggaran ke-15 merupakan revisi tingkat Kanwil DJPb untuk melakukan penghematan akun belanja perjalanan dinas sesuai Kebijakan S-1023/MK.02/2024.

Revisi anggaran ke-16 merupakan revisi Kuasa Pengguna Anggaran untuk pengeseran anggaran belanja operasional.

Revisi anggaran ke-17 merupakan revisi Kuasa Pengguna Anggaran untuk pengeseran anggaran belanja operasional.

Revisi anggaran ke-18 merupakan revisi tingkat Kanwil DJPb untuk pengurangan pagu hibah dan pemutakhiran POK.

Uraian	2024	
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Belanja		
- Rupiah Murni (RM)		
Belanja Pegawai	13.080.297.000,00	13.080.297.000,00
Belanja Barang	123.722.902.000,00	123.722.902.000,00
Belanja Modal	4.557.262.000,00	4.557.262.000,00
Jumah Belanja	141.360.461.000,00	141.360.461.000,00
- Hibah Langsung Dalam Negeri (HLD)		

Belanja Barang	227.133.206.000,00	181.442.318.000,00
Jumlah Belanja	227.133.206.000,00	181.442.318.000,00
Jumlah Belanja (RM + HLD)	368.493.667.000,00	322.802.779.000,00

Revisi anggaran ke-19 merupakan revisi tingkat Kanwil DJPb untuk penambahan pagu hibah tahun anggaran 2024.

Uraian	2024	
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Belanja		
- Rupiah Murni (RM)		
Belanja Pegawai	13.080.297.000,00	13.080.297.000,00
Belanja Barang	123.722.902.000,00	123.722.902.000,00
Belanja Modal	4.557.262.000,00	4.557.262.000,00
Jumah Belanja	141.360.461.000,00	141.360.461.000,00
- Hibah Langsung Dalam Negeri (HLD)		
Belanja Barang	227.133.206.000,00	183.437.528.000,00
Jumlah Belanja	227.133.206.000,00	183.437.528.000,00
Jumlah Belanja (RM + HLD)	368.493.667.000,00	324.797.989.000,00

Realisasi Pendapatan
Rp1.423.479.636,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.423.479.636,00. Pendapatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur merupakan pendapatan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pendapatan jasa giro dan penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		
	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	5.000.000,00	-
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0,00	2.275.566,00	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	39.628.407,00	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	1.376.575.663,00	-
Jumlah	0,00	1.423.479.636,00	-

Realisasi Pendapatan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.423.479.636,00, merupakan PNPB Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang seluruhnya berasal dari Realisasi Pendapatan Bruto, yang diperoleh dari:

1. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.000.000,00 merupakan pendapatan dari pemindahtanganan melalui penjualan (lelang) atas BMN sejumlah 501 unit sesuai Surat Persetujuan Pemindahtanganan nomor 6961.1/PL.08/K1/07/2024. Atas lelang tersebut telah terbit risalah lelang nomor 700/13.02/2024-01;
2. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp2.275.566,00 merupakan pendapatan jasa giro Rekening Dana Pemilu dan Rekening Dana Hibah Bawaslu Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Jumlah (Rp)
Setor Jasa Giro Rekening Panwascam se-Kota Balikpapan	29/02/2024	6B39E7QLUOQQBVBVE	1.062,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kubar Tahun 2024	23/04/2024	02FB01JNFUVS5P3L	414.529,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Paser Tahun 2024	23/04/2024	2F7AC61QV3RQ6P5A	12.058,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kubar Tahun 2023	23/04/2024	FBFAD0NA04DFOP0N	174.416,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sepaku - PPU tahun 2023	25/04/2024	48FF355DF99G0ETP	22.253,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sepaku - PPU tahun 2024	25/04/2024	B7FC348VVEN3JERF	25.249,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kutim Tahun 2024	25/04/2024	DB1333CIFK4N6E42	469.711,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan Penajam - PPU Tahun 2024	29/04/2024	0086855DF99L5IAG	70.156,00

Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan Waru - PPU Tahun 2024	29/04/2024	5DF9B0NA04DN4KL0	28.687,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan Babulu - PPU Tahun 2024	29/04/2024	909B00NA04DN4KSL	44.550,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Paser Tahun 2024	30/04/2024	DBA8A6U8EUEE7IO3	22.783,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024	30/04/2024	11E4361QV3S1Q9GE	645.346,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kutai Barat	30/04/2024	BF3BF61QV3S1Q9QB	45.243,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kukar Tahun 2024	30/04/2024	5E23A6U8EUEE783O	197.612,00
Setor Jasa Giro atas RDP Bawaslu Kabupaten Kutai Timur bulan Februari s.d. Maret 2023	18/09/2024	D82B66U8EUT05SM9	76.850,00
Setor Jasa Giro Ad-Hoc se-Kota Balikpapan bulan Juli s.d. Desember 2024	31/12/2024	E8A823CIFKSOJA4G	25.061,00
Total			2.257.566,00

3. Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp39.628.407,00, merupakan pengembalian atas uang makan dan tunjangan kinerja bulan Desember 2024. Rincian dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu adalah sebagai berikut:

Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Jumlah (Rp)
Pengembalian Tunjangan Fungsional a.n. Lely Febriyanti	23/01/2024	D7AC16U8EU52S72P	12.100.000,00
Pengembalian Tukin a.n. Lely Febriyanti	23/01/2024	08C9C48VVEDTL7GO	22.954.998,00

Pengembalian Uang Makan a.n. Lely Febriyanti	23/01/2024	9B5238N3EJ9RM995	3.304.100,00
Kelebihan Pembayaran Uang makan PNS Desember 2024	30/01/2024	CB85A1JNFUN5N3R5	192.400,00
Kelebihan Pembayaran Uang Lembur PNS Desember 2024	30/01/2024	82C4D61QV3J3O4H6	257.750,00
Pengembalian Tukin PNS Kab/Kota Desember 2024 a.n. Jainal Abidinsyah, dkk.	18/12/2024	865371JNFVNIMLUC	308.298,00
Pengembalian Tukin PPPK Kab/Kota Desember 2024 a.n. Firanty Maulidani Anshori	18/12/2024	BDF1A7QLUPO9HML5	43.905,00
Pengembalian Tukin PNS Provinsi Desember 2024 a.n. Ahmad Jeri, dkk.	18/12/2024	6D5BF7QLUPO9HL3A	466.956,00
Total			39.628.407,00

4. Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp1.376.575.663,00 terdiri dari setor kelebihan pembayaran perjalanan dinas TA. 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Jumlah (Rp)
Pengembalian Belanja Perdin LS sebelum milik Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Paser	05/01/2024	31C2D6U8EU4ORRIL	256.900.000,00
Pengembalian Belanja Perdin LS sebelum milik Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Paser	05/01/2024	4B2C83CIFJR77SQR	6.520.000,00
Pengembalian Belanja Perdin LS sebelum milik Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Paser	05/01/2024	6AC2261QV3ICEQ7G	1.650.000,00

Pengembalian Perjalanan Dinas Publikasi Kampanye	22/01/2024	9D6618N3EJ9SQ737	1.200.000,00
Pengembalian Perjalanan Dinas Logistik Luar Daerah	22/01/2024	087B161QV3INJ6JG	3.137.118,00
Pengembalian Perjalanan Dinas Pengawasan Kampanye	22/01/2024	A7D260NA044D56HE	18.300.000,00
Pengembalian Perjalanan Dinas Faskor Bawaslu RI	22/01/2024	25DEF0NA044D5AOE	6.884.473,00
Perjalanan Dinas Pengawasan Logistik Dalam Kota	22/01/2024	0A1723CIFJRIC45T	1.500.000,00
Pengembalian Perjalanan Dinas Publikasi Logistik	22/01/2024	4ED6E2G4VP960KBE	600.000,00
Pengembalian Perjalanan Dinas Faskor Bawaslu Provinsi	22/01/2024	90D9761QV3INJBPO	30.630.738,00
Pengembalian Perjalanan Dinas Faskor	22/01/2024	4F2B03CIFJRICBAV	16.536.767,00
Pengembalian Perjalanan Dinas Perdin Gakummdu Tahapan Kampanye	22/01/2024	B8C4648VVEDUP8G2	101.500,00
Pengembalian Perjalanan Dinas Undangan Terkait Kampanye	22/01/2024	B42AD0NA044D5A0C	4.699.500,00
Pengembalian Kompensasi 30% perjalanan dalam rangka supervisi terkait pemetaan potensi rawan calon TMS menjelang penetapan DCT Anggota DPRD tingkat Kab/kota	30/01/2024	5017E3CIFJRUAVRO	536.700,00
Pengembalian 30% perjalanan dinas ke Balikpapan dalam rangka menghadiri undangan Bawaslu RI kegiatan Rapat kerja teknis penguatan kelembagaan Bawaslu di Bidang hukum sebagai pemberi keterangan di MK	30/01/2024	985BB61QV3J3I1CT	236.700,00

Pengembalian Uang Harian ke Balikpapan menghadiri undangan Bawaslu RI pada kegiatan Rapat Koordinasi nasional Netralitas TNI Polri ASN Pemilu tanggal 26 s.d. 29 Oktober 2023 a.n. Daini Rahmat	30/01/2024	62A961JNFUN5H2P8	60.000,00
Pengembalian Uang harian dan kompensasi 30% Supervisi/monitoring kesiapan personel Sentra penegakan Hukum terpadu (Gakkumdu) tahapan kampanye di Bawaslu Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu	30/01/2024	9E2BC3CIFJRUB37B	1.702.500,00
Pengembalian Transport perjalanan dinas ke Bekasi dalam rangka menghadiri undangan Bawaslu RI kegiatan Konsolidasi penyusunan laporan keuangan Bawalu Triwulan III tanggal 15 s.d 18 Oktober 2023 a.n. Dyah Ayu	30/01/2024	68AE31JNFUN5H4P1	193.000,00
Pengembalian TUP Bulan Desember Perjalanan Dinas Faskor Ke Provinsi	30/01/2024	048BA55DF90K2S8H	218.000,00
Pengembalian TUP Bulan Desember Perjalanan Dinas Faskor ke Provinsi	30/01/2024	BCDC92G4VP9ERTQ E	150.000,00
Pengembalian TUP Bulan Desember 2024 Perjalanan Dinas Faskor Bawaslu RI	30/01/2024	25A0A8N3EJA5MULR	200.000,00
Pengembalian TUP Bulan Deseember 2023 Belanja Perjalanan dinas biasa dalam rangka Pengawasan Logistik	30/01/2024	E62297QLUONPA17C	676.457,00

Pengembalian TUP Bulan Deseember 2023 Perjalanan dinas dalam kota Pengawasan Kampanye	30/01/2024	DA35A3CIFJRR92BP	4.540.000,00
Pengembalian TUP Bulan Deseember 2023 Belanja Perjalanan dinas Faskor Bawaslu Provinsi	30/01/2024	242E661QV3J0G0QG	8.355.818,00
Pengembalian Perjalanan Dinas Publikasi dan Dolkumentasi Pengawasan Logistik (Kecamatan) Kabupaten Berau	10/02/2024	35F746U8EU7SMOU Q	25.850.000,00
Pengembalian Perjalanan Dinas Publikasi dan Dokumentasi Pengawasan Masa Kampanye (Kecamatan) Kabupaten Berau	10/02/2024	EEBE72G4VPBULO5 7	92.910.000,00
Pengembalian Pelayanan Operasional Perkantoran (Kecamatan) Kabupaten Berau	10/02/2024	6DCCF1JNFUPI8ORD	1.512.000,00
Pengembalian Perjalanan Dinas Fasilitas, Koordinasi , dan Pelaporan (Kecamatan) Kabupaten Berau	10/02/2024	48C206U8EU7SMOC C	52.410.000,00
Pengembalian RDP Perjalanan Dinas Dalam Verifikasi Faktual	29/02/2024	693C52G4VPCFU1EQ	900.000,00
Pengembalian RDP Langganan Air	29/02/2024	AEC351JNFUQ3GUTJ	5.771,00
Pengembalian RDP Internet	29/02/2024	444AC1JNFUQ3GVS Q	313.800,00
Pengembalian RDP Rapat Publikasi Kampanye	29/02/2024	80E6355DF93L4UM1	4.760.000,00
Pengembalian RDP Perjalanan Dinas dalam Kota	29/02/2024	F8B0661QV3M1I0P1	10.580.000,00
Pengembalian RDP Perjalanan Dinas Kampanye	29/02/2024	0E6F00NA047N3TCS	26.150.000,00

Pengembalian RDP Rapat Biasa	29/02/2024	750133CIFJUSAUQL	240.000,00
Pengembalian RDP Perjalanan Dinas Logistik	29/02/2024	D85E07QLUOQQC13 4	2.400.000,00
Pengembalian ke 2 Dana TUP Tahun 2023 Bawaslu Kab Kubar	17/04/2024	9D0D27QLUP0EJ0TE	41.473.895,00
Pengembalian LS Ad Hoc Tahun 2023	23/04/2024	8429955DF99DPPSM	51.457.000,00
Pengembalian LS Ad Hoc Tahun 2023	23/04/2024	7EA883CIFK4KVPU4	250.000,00
Pengembalian LS Ad Hoc Tahun 2023	23/04/2024	5A6B82G4VPI8IQHD	832.000,00
Pengembalian LS Ad Hoc Tahun 2023	23/04/2024	7C18A1JNFUVS5Q58	8.360.000,00
Pengembalian LS Ad Hoc Tahun 2023	23/04/2024	4D04C1JNFUVS5Q3K	40.280.000,00
Pengembalian LS Ad Hoc Tahun 2023	23/04/2024	F6EB355DF99DPQ20	9.650.000,00
Pengembalian LS Ad Hoc Tahun 2023	23/04/2024	995A348VVEN1CQ11	210.000,00
Pengembalian LS Ad Hoc Tahun 2023	23/04/2024	129B67QLUP0J0QNP	532.880.000,00
Pengembalian Pokja Gakkumdu Tahun 2023 Kabupaten Kutai Kartanegara	07/05/2024	374F56U8EUGODCE G	6.460.000,00
Pengembalian Pokja Gakkumdu Tahun 2023 Kabupaten Kutai Kartanegara	07/05/2024	C8A3555DF9BVJBDM	21.660.000,00
Pengembalian Transport Perjadin dalam rangka menghadiri Konsolidasi Nasional di Jakarta tgl 24 s.d. 29 Nov 2023 a.n. Daini Rahmat	08/05/2024	0911261QV3UD31KV	279.500,00
Pengembalian Tiket Perjadin dalam rangka menghadiri Undangan Bawaslu RI di Jakarta Tanggal 12 sd 14 Desember 2024 a.n. Yusuf	08/05/2024	6C94948VVEPK9055	2.194.420,00
Pengembalian Transport Perjadin dalam Rangka menghadiri undangan RI ke Manado Pada tgl 28 s.d. 1 Des 2023 a.n. Yusuf	08/05/2024	4C5D63CIFK77RVM0	164.480,00

Pengembalian BBM dalam rangka Memfasilitasi staf Bawaslu RI Ke Bandara APT Pranoto tgl 20 Okt 2023 a.n M. Azizu Malik Effendi	08/05/2024	2664D55DF9C0LQKE	250.000,00
Pengembalian Transport Perjadin dalam Rangka pengawasan Logistik Pemilu TA. 2024 di Pasuruan tgl 3 s.d. 6 Des 2023 a.n. Wamustofa Hamzah	08/05/2024	C84CC55DF9C0LSEE	200.000,00
Pengembalian Honor Pokja Gakkumdu Tahun 2023 Kabupaten Kutai Timur	13/05/2024	5E7291JNFV2E18OC	5.415.000,00
Pengembalian Honor Pokja Gakkumdu Tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Mahulu	13/05/2024	DB82C0NA04G5PAK1	902.500,00
Pengembalian Honor Pokja Gakkumdu Tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Mahulu	13/05/2024	0D9B97QLUP391AKF	3.610.000,00
Pengembalian Honor Pokja Gakkumdu Tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Mahulu	13/05/2024	80E2F3CIFK7B0ALS	4.512.500,00
Pengembalian Honor Pokja Tahun 2023 a.n Anson G. Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	13/05/2024	DA1097QLUP391AMU	950.000,00
Pengembalian Honor Pokja Tahun 2023 a.n. Sarwindah Bawaslu Kab Mahakam Ulu	13/05/2024	14DD42G4VPKUJBH O	1.900.000,00
Pengembalian Honor Pokja a.n. Sella Lestari Bawaslu kab. Mahakam Ulu	13/05/2024	DC9500NA04G5PBIB	1.900.000,00
Pengembalian Honor Pokja Tahun 2023 a.n. Stefi Bawaslu Kab. Mahakam Ulu	13/05/2024	E901A48VVEPNDBIF	1.900.000,00
Pengembalian Honor Pokja Tahun 2023 a.n. Wahyudin Bawaslu Kab. Mahakam Ulu	13/05/2024	9218B3CIFK7B0BJ0	1.900.000,00

Pengembalian Honor Pokja Gakkumdu Tahun 2023 Kabupaten Kutai Barat	13/05/2024	894E23CIFK7A1CV7	2.707.500,00
Pengembalian Honor Gakkumdu Tahun 2023 kabupaten Kutai Barat	13/05/2024	538BD7QLUP382DBR	4.930.000,00
Pengembalian Honor Pokja Gakkumdu Tahun 2023 Bawaslu Kota Balikpapan	13/05/2024	71CF755DF9C3QAE1	10.830.000,00
Pengembalian Honor Pokja Gakkumdu Tahun 2023 a.n. Nurul Hidayah Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	22/06/2024	10D692G4VPO7S2NK	1.805.000,00
Pengembalian Perjalanan Dinas ke Balikpapan tanggal 22 s.d. 23 Desember 2024 a.n. Wamustofa Hamzah	03/09/2024	555252G4VQ0JQHU3	296.000,00
Pengembalian Perjalanan Dinas ke Jakarta tanggal 19 s.d. 24 Desember 2024 a.n. Heddi Nopriwibowo	03/09/2024	2FF5F6U8EUSHRK5T	104.000,00
Pengembalian Perjalanan Dinas ke PPU tanggal 21 s.d. 22 Desember 2024 a.n. Hari Dermanto dan Zelot Aritonang	03/09/2024	4394555DF9NP3H63	1.420.500,00
Pengembalian Perjalanan Dinas ke Berau tanggal 23 s.d. 25 Desember 2024 a.n. Daini Rahmat	03/09/2024	657470NA04RR0KRK	134.000,00
Pengembalian Perjalanan Dinas ke Kutim tanggal 22 s.d. 24 Desember 2024 a.n. Josua Mikhael	03/09/2024	D33E93CIFKJ07MDT	438.700,00
Pengembalian Perjalanan Dinas ke Paser tanggal 27 s.d. 29 Desember 2024 a.n. Ratna Dewi	03/09/2024	4ED417QLUPEU8NM 1	290.400,00
Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas tahun 2023 a.n. M. Teguh	03/09/2024	98AEF1JNFVE7EK64	190.400,00

Adiguna Weynand dkk			
Pengembalian Perjalanan Dinas tahun 2023 a.n. Galeh Akbar Tanjung dkk	03/09/2024	A9C830NA04RR1LSC	999.200,00
Pengembalian Perjalanan Dinas ke Mahulu tanggal 27 s.d. 30 Desember 2024 an. Ridho Wirawan	03/09/2024	53FBA61QV4A5FNHJ	50.000,00
Pengembalian Perjalanan Dinas ke Kutim tanggal 23 s.d. 25 Desember 2024 a.n. Ridho Wirawan	03/09/2024	A34CE3CIFKJ08OU1	120.000,00
Pengembalian Perjalanan Dinas ke Kutim tanggal 20 s.d. 22 Desember 2024 a.n. Ridho Wirawan	03/09/2024	B15BE1JNFVE7EQ4Q	120.000,00
Pengembalian Perjalanan Dinas tahun 2023 a.n. Siti Khadijah dkk	03/09/2024	4C0A348VVF5CLPMF	6.276.640,00
Pengembalian an. Arrohman Nur dkk Perjalanan dinas Ke Jakarta tanggal 27 s/d 29 Desember 2024 dalam rangka Pengawasan Distribusi Logistik di Kota Jakarta Timur	23/12/2024	D406361QV4JM9AMV	22.711.186,00
Total			1.376.575.663,00

Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 19.546,68% dibandingkan 31 Desember 2023. Kenaikan terjadi dikarenakan Penerimaan Kembali atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu di TA 2024 lebih besar dibandingkan dengan TA 2023.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Uraian	Realisasi 31 Des 2024 (Rp)	Realisasi 31 Des 2023 (Rp)	Naik (Turun) %
---------------	---	---	---------------------------

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	0,00	-
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	2.275.566,00	1.267.267,00	79,56
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	39.628.407,00	552.088,00	7.077,91
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.376.575.663,00	5.426.042,00	25.269,79
Jumlah	1.423.479.636,00	7.245.397,00	19.546,68

Realisasi Belanja

Negara

Rp277.892.437.265,00

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Instansi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp277.892.437.265,00 atau 85,56% dari anggaran belanja sebesar Rp324.797.989.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024		% Realisasi Anggaran
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Pegawai	13.080.297.000,00	12.162.684.662,00	92,98
Belanja Barang	307.160.430.000,00	261.526.462.603,00	85,14
Belanja Modal	4.557.262.000,00	4.203.290.000,00	92,23
Total Belanja Kotor	324.797.989.000,00	277.892.437.265,00	85,56
Jumlah	324.797.989.000,00	277.892.437.265,00	85,56

Dibandingkan dengan 31 Desember 2023, realisasi belanja per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 118,71% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Kenaikan yang paling signifikan terjadi pada belanja modal yaitu sebesar 318,85% dibanding tahun lalu. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2024 diselenggarakan Pemilu dan Pilkada sehingga realisasi belanja sampai ke tingkat PTPS, sedangkan pada tahun 2023 hanya terjadi tahapan Pemilu.

*Perbandingan Realisasi Belanja
per 31 Desember 2024 dan 2023*

Uraian	Realisasi 31 Des 2024 (Rp)	Realisasi 31 Des 2023 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	12.162.684.662,00	8.709.390.360	39,65
Belanja Barang	261.526.462.603,00	117.347.977.038	122,86
Belanja Modal	4.203.290.000,00	1.003.531.804	318,85
Jumlah	277.892.437.265,00	127.060.899.202	118,71

Realisasi Belanja

Pegawai

Rp12.162.684.662,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp12.162.684.662,00 dan Rp8.709.390.360,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 118,28% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Kenaikan belanja pegawai disebabkan oleh adanya:

1. Penambahan jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024;
2. Terdapat pegawai yang mengalami mutasi dari unit kerja lain ke Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

*Perbandingan Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Uraian	Realisasi 31 Des 2024 (Rp)	Realisasi 31 Des 2023 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.626.854.137,00	1.436.387.046,00	13,26
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	6.256.155.050,00	6.063.664.400,00	3,17
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	1.556.863.277,00	34.997.080,00	4.348,55
Belanja Lembur	28.734.000,00	36.817.000,00	(21,95)
Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	2.694.078.198,00	1.139.464.406,00	136,43
Jumlah Belanja Kotor	12.162.684.662,00	8.711.329.932,00	39,62

Pengembalian Belanja Pegawai	(0,00)	(1.939.572,00)	(100)
Jumlah Belanja	12.162.684.662,00	8.709.390.360,00	39,61

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.162.684.662,00 seluruhnya berasal dari Anggaran Rupiah Murni (RM) yang dipergunakan untuk:

1. Pembayaran Gaji Pokok PNS dan PPPK bulan Januari s.d. Desember 2024;
2. Pembayaran THR dan Gaji 13 PNS dan PPPK Tahun 2024;
3. Pembayaran Uang Kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bulan Januari s.d. Desember 2024;
4. Pembayaran THR dan Gaji 13 Uang Kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tahun 2024;
5. Pembayaran Belanja Pembulatan Gaji PNS bulan Januari s.d. Desember 2024;
6. Pembayaran Belanja Tunjangan Suami/Istri dan Tunjangan Anak PNS dan PPPK bulan Januari s.d. Desember 2024;
7. Pembayaran Belanja Tunjangan Umum PNS dan PPPK bulan Januari s.d. Desember 2024;
8. Pembayaran Tunjangan Struktural dan Fungsional PNS bulan Januari s.d. Desember 2024;
9. Pembayaran Tunjangan Fungsional PPPK bulan Januari s.d. Desember 2024;
10. Pembayaran Tunjangan PPh PNS bulan Januari s.d. Desember 2024;
11. Pembayaran Tunjangan Beras PNS dan PPPK bulan Januari s.d. Desember 2024;
12. Pembayaran Uang Makan PNS dan PPPK bulan Januari s.d. Desember 2024;
13. Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur PNS dan PPPK bulan Januari s.d. Desember 2024;

14. Pembayaran Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) PNS dan PPPK bulan Januari s.d Desember 2024.

Realisasi Belanja

Barang

Rp261.526.462.603,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp261.526.462.603,00 dan Rp117.347.977.038,00. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 122,86% dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023. Kenaikan paling signifikan terjadi pada Belanja Perjalanan Dalam Negeri yaitu sebesar 199,74%. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2024 diselenggarakan Pemilu dan Pilkada sehingga realisasi belanja perjalanan dinas dalam negeri terjadi sampai ke tingkat PTPS, sedangkan pada tahun 2023 hanya terjadi tahapan Pemilu.

Perbandingan Belanja Barang

Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	9.082.153.834,00	10.416.325.260	(12,81)
Belanja Barang Non Operasional	76.597.563.130,00	41.045.373.808	86,62
Belanja Barang Persediaan	16.685.050,00	24.613.125	(32,21)
Belanja Jasa	33.031.913.536,00	16.844.457.045	96,10
Belanja Pemeliharaan	1.906.456.273,00	1.877.321.407	1,55
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	142.008.508.103,00	47.377.488.713	199,74
Jumlah Belanja Kotor	262.643.279.926,00	117.585.579.358	123,36
Pengembalian Belanja	(1.116.817.323,00)	(237.602.320)	370,04
Jumlah Belanja	261.526.462.603,00	117.347.977.038	122,86

Realisasi belanja barang per 31 Desember 2024 sebesar Rp261.526.462.603,00 dipergunakan untuk:

1. Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif;

3. Pengawasan Pilkada Serentak Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
5. Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;
6. Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc;
7. Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu;
8. Honorarium dan Operasional Pengawas Ad-Hoc;
9. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye;
10. Pengawasan Masa Kampanye dan Masa Tenang;
11. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Tenang;
12. Penanganan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara;
13. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
14. Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu;
15. Publikasi Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
16. Pengawasan Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
17. Penanganan Pelanggaran Logistik;
18. Pengawasan Logistik;
19. Layanan Reformasi Kinerja;
20. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu;
21. Layanan Data dan Informasi;
22. Layanan BMN;
23. Layanan Perkantoran;
24. Layanan Sarana Internal;
25. Layanan Perencanaan dan Penganggaran;
26. Layanan Pemantauan dan Evaluasi;

- 27. Layanan Manajemen Keuangan;
- 28. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan;
- 29. Layanan Hukum, Layanan Umum, dan Layanan Bantuan Hukum; dan
- 30. Layanan Manajemen SDM.

Realisasi belanja barang dari bulan Januari s.d. Desember 2024 bersumber dari Anggaran Rupiah Murni (RM) dan Hibah Langsung Dalam Negeri (HLD). Rincian sumber dana per jenis belanja barang dari bulan Januari s.d. Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Realisasi Anggaran RM (Rp)	Realisasi Anggaran HLD (Rp)
Belanja Keperluan Perkantoran	7.259.975.339,00	646.929.671,00
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0,00	0,00
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	252.968.000,00	215.536.550,00
Belanja Barang Operasional Lainnya	706.744.274,00	0,00
Belanja Bahan	5.910.263.316,00	16.065.138.465,00
Belanja Honor Output Kegiatan	21.170.230.000,00	30.338.268.000,00
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.881.399.797,00	1.205.263.552,00
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	27.000.000,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	16.685.050,00	0,00
Belanja Langganan Listrik	572.529.202,00	260.709.765,00
Belanja Langganan Air	125.494.394,00	115.060.469,00
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.552.500,00	0,00
Belanja Sewa	11.950.095.256,00	14.854.583.487,00
Belanja Jasa Profesi	349.200.000,00	1.514.046.463,00
Belanja Jasa Lainnya	50.000.000,00	3.238.642.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	75.954.500,00	41.995.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.628.673.129,00	159.833.644,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.138.202.879,00	22.860.413.611,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.638.818.110,00	30.416.205.069,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.143.332.000,00	34.880.068.400,00

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	543.868.993,00	5.387.599.041,00
Jumlah Belanja Kotor	100.442.986.739,00	162.200.293.187,00
Pengembalian Belanja	(1.116.817.323,00)	(0,00)
Jumlah Belanja	99.326.169.416,00	162.200.293.187,00

Realisasi Belanja

Modal

Rp4.203.290.000,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.203.290.000,00 dan Rp1.003.531.804,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 318,85% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal tersebut dikarenakan adanya tambahan anggaran Prioritas Nasional untuk Pengadaan kendaraan bermotor Bawaslu Provinsi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.203.290.000,00	725.826.804	479,10
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	187.705.000	(100)
Belanja Modal Lainnya	0,00	90.000.000	(100)
Jumlah Belanja Kotor	4.203.290.000,00	1.003.531.804	318,85
Pengembalian	(0,00)	(0,00)	0,00
Jumlah Belanja	4.203.290.000,00	1.003.531.804	318,85

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.203.290.000,00 seluruhnya berasal dari Anggaran Rupiah Murni (RM).

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.203.290.000,00 dan Rp725.826.804,00. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31

Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 479,10% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi ini digunakan untuk:

1. Pengembangan sistem informasi Bawaslu;
2. Pengadaan kendaraan bermotor Bawaslu Provinsi;
3. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran; dan
4. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Des 2024 (Rp)	Realisasi 31 Des 2023 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.203.290.000,00	725.826.804	479,10
Jumlah Belanja	4.203.290.000,00	725.826.804	479,10

Pembelian Peralatan dan Mesin dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel Mutasi Pembelian

Peralatan dan Mesin TA 2024

Kode Barang	Jenis BMN	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)
3.02.01.01.003	Station Wagon	6	3.620.400.000,00
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	16	63.100.000,00
3.05.01.04.005	Filling Cabinet Besi	2	8.000.000,00
3.05.01.05.015	Alat Penghancur Kertas	10	39.870.000,00
3.05.02.01.008	Meja Rapat	2	35.000.000,00
3.05.02.06.008	Sound System	2	17.375.000,00
3.05.02.06.046	Handy Cam	1	12.000.000,00
3.06.01.02.128	Camera Digital	11	164.675.000,00
3.10.01.02.001	P.C. Unit	5	59.850.000,00
3.10.01.02.002	Lap Top	12	183.020.000,00
Total		66	4.203.290.000,00

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp187.705.000,00.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Uraian	Realisasi 31 Des 2024 (Rp)	Realisasi 31 Des 2023 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	187.705.000,00	(100)
Jumlah Belanja	0,00	187.705.000,00	(100)

B.5.3 Belanja Modal Lainnya

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp90.000.000,00.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Uraian	Realisasi 31 Des 2024 (Rp)	Realisasi 31 Des 2023 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	0,00	90.000.000,00	(100)
Jumlah Belanja	0,00	90.000.000,00	(100)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp52.771.349,00. Posisi kas per 31 Desember 2024 dapat dirincikan sebagai berikut:

Keterangan	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
Uang tunai	0,00	0,00
Rekening Bank	0,00	0,00
Uang di BPP	0,00	52.771.349,00
Kuitansi UP belum di-SPM-kan	0,00	0,00
Total	0,00	52.771.349,00

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp100.157.989.090,00*

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp100.157.989.090,00 dan Rp122.776.223.044,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Kas lainnya dan setara kas dapat dirincikan sebagai berikut:

Keterangan	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	149.017.917,00	34.500,00
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	100.008.971.173,00	122.776.188.544,00
Total	100.157.989.090,00	122.776.223.044,00

Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp149.017.917,00 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nominal (Rp)
1.	Pajak belum setor (RM)	2.226.049,00
2.	Pajak belum setor (HLD)	112.069.936,00
3.	Kas Lainnya di BP	34.721.932,00
Total		149.017.917,00

Rincian Kas Lainnya di K/L dari Hibah per 31 Desember 2024 sebesar Rp100.008.971.173,00 merupakan sisa dana hibah pada tahun anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	BP Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	58.247.692.962,00
2.	BPP Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	2.748.408.133,00
3.	BPP Bawaslu Kota Balikpapan	5.103.524.634,00
4.	BPP Bawaslu Kota Samarinda	324.000,00
5.	BPP Bawaslu Kab. Berau	2.365.217.273,00
6.	BPP Bawaslu Kota Bontang	4.154.810.470,00
7.	BPP Bawaslu Kab. Kutai Barat	4.743.352.407,00
8.	BPP Bawaslu Kab. Kutai Kartanegara	2.252.568.097,00
9.	BPP Bawaslu Kab. Kutai Timur	9.590.748.400,00
10.	BPP Bawaslu Kab. Mahakam Ulu	1.676.047.518,00
11.	BPP Bawaslu Kab. Paser	5.846.790.910,00
12.	BPP Bawaslu Kab. Penajam Paser Utara	3.279.486.369,00
Total		100.008.971.173,00

*Belanja Dibayar di
Muka (Prepaid)
Rp980.661.473,00*

C.3 Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)

Saldo Belanja Dibayar di Muka (Prepaid) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp980.661.473,00 dan Rp431.450.000,00. Rincian Belanja Dibayar di Muka (Prepaid) sebesar Rp980.661.473,00 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jangka Waktu Sewa (Bulan)	Periode		Jumlah Nilai Sewa	Beban Sewa per 31 Des 2024	Sewa Dibayar di Muka per 31 Des 2024
		Mulai	Berakhir			

Sewa Kendaraan Roda 4 Operasional (Double Gardan) Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	12	27 Feb 2024	27 Feb 2025	893.616.000,00	819.148.000,00	74.468.000,00
Sewa Kendaraan Roda 4 Operasional Lanjutan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	12	27 Feb 2024	27 Feb 2025	2.365.850.256,00	2.168.696.068,00	197.154.188,00
Pekerjaan Pengadaan Fasilitas Bantuan Sewa Rumah Dinas (Kabag. Andri Purwanta)	12	26 Feb 2024	26 Feb 2025	25.000.000,00	22.916.667,00	2.083.333,00
Pekerjaan Pengadaan Fasilitas Bantuan Sewa Rumah Dinas (Kordiv. Daini Rahmat)	12	18 April 2024	18 April 2025	42.000.000,00	31.500.000,00	10.500.000,00
Pekerjaan Pengadaan Fasilitas Bantuan Sewa Rumah Dinas (Ketua Hari Darmanto)	12	02 Feb 2024	02 Feb 2025	42.000.000,00	38.500.000,00	3.500.000,00
Pekerjaan Pengadaan Fasilitas Bantuan Sewa Rumah Dinas (Kabag. Andi Tinah)	12	13 Feb 2024	13 Feb 2025	25.000.000,00	22.916.667,00	2.083.333,00
Belanja Sewa Sarana dan Prasarana Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Timur Dalam Rangka Pilkada Tahun 2024	12	11 Feb 2024	11 Feb 2025	79.200.000,00	67.885.714,00	11.314.286,00
Sewa Gedung Kantor Bawaslu Kota Balikpapan	12	11 Juli 2024	10 Juli 2025	356.950.000,00	178.475.000,00	178.475.000,00
Sewa Kendaraan Roda 4 Operasional Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Berau	12	06 Mei 2024	05 Mei 2025	82.200.000,00	54.800.000,00	27.400.000,00

Sewa Kendaraan Operasional Gakkumdu Kota Bontang	9	06 Mei 2024	05 Feb 2025	61.650.000,00	54.800.000,00	6.850.000,00
Sewa Gedung Kantor Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	12	15 Feb 2024	15 Feb 2025	418.000.000,00	383.166.667,00	34.833.333,00
Sewa Sapras Barong Tongkok dan Sekolaq Darat	8	01 Juni 2024	31 Jan 2025	148.800.000,00	130.200.000,00	18.600.000,00
Sewa Sapras Melak dan Mook Manaar Bulatn	8	01 Juni 2024	31 Jan 2025	148.800.000,00	130.200.000,00	18.600.000,00
Sewa Sapras Muara Pahu dan Penyinggahan	8	01 Juni 2024	31 Jan 2025	148.800.000,00	130.200.000,00	18.600.000,00
Sewa Sapras Linggang Bigung dan Tering	8	01 Juni 2024	31 Jan 2025	148.800.000,00	130.200.000,00	18.600.000,00
Sewa Sapras Long Iram dan Nyuatan	8	01 Juni 2024	31 Jan 2025	148.800.000,00	130.200.000,00	18.600.000,00
Sewa Sapras Damai dan Muara Lawa	8	01 Juni 2024	31 Jan 2025	148.800.000,00	130.200.000,00	18.600.000,00
Sewa Sapras Bentian Besar dan Siluq Ngurai	8	01 Juni 2024	31 Jan 2025	148.800.000,00	130.200.000,00	18.600.000,00
Sewa Sapras Jempang dan bongan	8	01 Juni 2024	31 Jan 2025	148.800.000,00	130.200.000,00	18.600.000,00
Sewa Meubelair Barong Tongkok dan Sekolaq Darat	8	01 Juni 2024	31 Jan 2025	127.200.000,00	111.300.000,00	15.900.000,00
Sewa Meubelair Melak dan Mook Manaar Bulatn	8	01 Juni 2024	31 Jan 2025	127.200.000,00	111.300.000,00	15.900.000,00
Sewa Meubelair Muara Pahu dan Penyinggahan	8	01 Juni 2024	31 Jan 2025	127.200.000,00	111.300.000,00	15.900.000,00
Sewa Meubelair Linggang Bigung dan Tering	8	01 Juni 2024	31 Jan 2025	127.200.000,00	111.300.000,00	15.900.000,00
Sewa Meubelair Long Iram dan Nyuatan	8	01 Juni 2024	31 Jan 2025	127.200.000,00	111.300.000,00	15.900.000,00
Sewa Meubelair Damai dan Muara Lawa	8	01 Juni 2024	31 Jan 2025	127.200.000,00	111.300.000,00	15.900.000,00
Sewa Meubelair Bentian Besar dan Siluq Ngurai	8	01 Juni 2024	31 Jan 2025	127.200.000,00	111.300.000,00	15.900.000,00
Sewa Meubelair Jempang dan Bongan	8	01 Juni 2024	31 Jan 2025	127.200.000,00	111.300.000,00	15.900.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Operasional Roda 4 Gakkumdu Bawaslu Kabupaten	12	06 Mei 2024	05 Mei 2025	61.650.000,00	41.100.000,00	20.550.000,00

Kutai Kartanegara						
Sewa Sewa Gedung Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara	8	01 Juni 2024	31 Jan 2025	32.000.000,00	28.000.000,00	4.000.000,00
Sewa Sewa Gedung Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sangatta Selatan	8	01 Juni 2024	31 Jan 2025	24.000.000,00	21.000.000,00	3.000.000,00
Sewa Sewa Gedung Sekretariat Panwaslu Kecamatan Teluk Pandan	8	01 Juni 2024	31 Jan 2025	24.000.000,00	21.000.000,00	3.000.000,00
Sewa Sewa Gedung Sekretariat Panwaslu Kecamatan Bengalon	8	01 Juni 2024	31 Jan 2025	28.000.000,00	24.500.000,00	3.500.000,00
Sewa Sewa Gedung Sekretariat Panwaslu Kecamatan Rantau Pulung	8	01 Juni 2024	31 Jan 2025	28.000.000,00	24.500.000,00	3.500.000,00
Sewa Sewa Gedung Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sangkulirang	8	01 Juni 2024	31 Jan 2025	28.000.000,00	24.500.000,00	3.500.000,00
Sewa Sewa Gedung Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sandaran	8	01 Juni 2024	31 Jan 2025	24.000.000,00	21.000.000,00	3.000.000,00
Sewa Sewa Gedung Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kaliorang	8	01 Juni 2024	31 Jan 2025	24.000.000,00	21.000.000,00	3.000.000,00
Sewa Sewa Gedung Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kaubun	8	01 Juni 2024	31 Jan 2025	24.000.000,00	21.000.000,00	3.000.000,00
Sewa Sewa Gedung Sekretariat Panwaslu Kecamatan Karang	8	01 Juni 2024	31 Jan 2025	24.000.000,00	21.000.000,00	3.000.000,00
Sewa Sewa Gedung Sekretariat Panwaslu Kecamatan Telen	8	01 Juni 2024	31 Jan 2025	20.000.000,00	17.500.000,00	2.500.000,00
Sewa Sewa Gedung Sekretariat	8	01 Juni 2024	31 Jan 2025	28.000.000,00	24.500.000,00	3.500.000,00

Panwaslu Kecamatan Muara Wahau						
Sewa Sewa Gedung Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kongbeng	8	01 Juni 2024	31 Jan 2025	28.000.000,00	24.500.000,00	3.500.000,00
Sewa Sewa Gedung Sekretariat Panwaslu Kecamatan Batu Ampar	8	01 Juni 2024	31 Jan 2025	24.000.000,00	21.000.000,00	3.000.000,00
Sewa Sewa Gedung Sekretariat Panwaslu Kecamatan Muara Bengkal	8	01 Juni 2024	31 Jan 2025	28.000.000,00	24.500.000,00	3.500.000,00
Sewa Sewa Gedung Sekretariat Panwaslu Kecamatan Muara Ancalong	8	01 Juni 2024	31 Jan 2025	22.000.000,00	19.250.000,00	2.750.000,00
Sewa Sewa Gedung Sekretariat Panwaslu Kecamatan Long Mesangat	8	01 Juni 2024	31 Jan 2025	24.000.000,00	21.000.000,00	3.000.000,00
Sewa Sewa Gedung Sekretariat Panwaslu Kecamatan Busang	8	01 Juni 2024	31 Jan 2025	28.000.000,00	24.500.000,00	3.500.000,00
Sewa Meubelair Panwaslu Kecamatan Bengalon	8	01 Juni 2024	31 Jan 2025	36.000.000,00	31.500.000,00	4.500.000,00
Sewa Sapras Panwaslu Kecamatan Bengalon	8	01 Juni 2024	31 Jan 2025	36.000.000,00	31.500.000,00	4.500.000,00
Sewa kendaraan Gakkumdu Pilkada (Adendum) Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	9	10 Juni 2024	05 Feb 2025	61.650.000,00	47.950.000,00	13.700.000,00
Sewa Gedung Kantor Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	12	07 Maret 2024	07 Maret 2025	330.000.000,00	275.000.000,00	55.000.000,00

Bagian Lancar
TP/TGR
Rp406.869.509,00

C.4 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah

sebesar Rp406.869.509,00 dan Rp406.869.509,00. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut merupakan temuan sisa dana hibah Pilkada serentak tahun 2015 yang belum dikembalikan ke kas daerah oleh Panwaslu Kota Samarinda per 31 Desember 2024 senilai Rp406.869.509,00.

*Penyisihan Piutang -
Bagian Lancar
TP/TGR
Rp2.034.348,00*

C.5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.034.348,00.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debeturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dihitung berdasarkan PMK Nomor 201/PMK.06/2010, yaitu ditetapkan paling sedikit 5‰ (lima permil) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian lancar tagihan tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.034.348,00. Nilai tersebut merupakan 5‰ (lima permil) dari nilai Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi yaitu Rp408.869.509,00.

Bagian Lancar
TP/TGR (Netto)
Rp404.835.161,00

C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)

Nilai Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp404.835.161,00. Piutang tagihan TP adalah Piutang yang timbul dari akibat tuntutan yang dikenakan Bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara. TP dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundangan. Nilai tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) sebesar Rp404.835.161,00 merupakan hasil dari nilai tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp406.869.509 dikurangi nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp2.034.348,00.

Persediaan
Rp7.131.000,00

C.7 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp7.131.000,00 dan Rp1.286.676.600.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Jenis	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
Barang Konsumsi	7.131.000,00	1.286.676.600,00
Persediaan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	7.131.000,00	1.286.676.600,00

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik, yang terdiri dari:

No	Kode Barang	Jenis Barang	Nominal (Rp)
1	1010304010	Mouse	881.500,00
2	1010306010	Batu Baterai	3.837.000,00

3	1010309001	Materai	1.100.000,00
4	1010399999	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.312.500,00
Total			7.131.000,00

Mutasi nilai Persediaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

Saldo Nilai Perolehan per 1 Jan 2024	1.286.676.600,00
Mutasi Tambah	
Pembelian – Barang Konsumsi	16.685.050,00
Jumlah Mutasi Tambah	1.303.361.650,00
Mutasi Kurang	
Pemakaian – Barang Konsumsi	1.296.230.650,00
Jumlah Mutasi Kurang	1.296.230.650,00
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	7.131.000,00

Penjelasan Mutasi:

1. Pembelian sebesar Rp16.685.050,00 merupakan pembelian persediaan yang terdiri dari:

No	Kode	Nama Barang	Kuantitas	Jumlah (Rp)
1	1010301001	Alat Tulis	12	65.700,00
2	1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	1	64.650,00
3	1010301004	Penghapus/Korektor	6	37.500,00
4	1010301006	Ordner Dan Map	160	322.500,00
5	1010301010	Alat Perekat	17	104.225,00
6	1010301012	Staples	6	144.150,00
7	1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	7	77.725,00
8	1010302001	Kertas HVS	34	2.475.975,0
9	1010302002	Berbagai Kertas	26	1.673.300,00
10	1010302003	Kertas Cover	1	50.850,00
11	1010302004	Amplop	3	369.000,00
12	1010304004	Tinta/Toner Printer	6	711.025,00
13	1010304010	Mouse	5	881.500,00
14	1010306010	Batu Baterai	257	4.108.700,00
15	1010309001	Meterai	383	3.924.500,00
16	1010399999	Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	65	1.673.750,00
Total			989	16.685.050,00

2. Mutasi kurang berupa pemakaian persediaan sampai dengan periode 31 Desember 2024 sebesar Rp1.296.230.650,00 terdiri dari:

No	Kode	Nama Barang	Kuantitas	Jumlah (Rp)
1	1010301001	Alat Tulis	53	539.350,00
2	1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	1	64.650,00
3	1010301003	Penjepit Kertas	13	52.025,00
4	1010301004	Penghapus/Korektor	15	116.025,00
5	1010301006	Ordner Dan Map	160	322.500,00
6	1010301007	Penggaris	5	42.875,00
7	1010301010	Alat Perekat	25	192.850,00
8	1010301012	Staples	10	269.850,00
9	1010301013	Isi Staples	19	68.075,00
10	1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	22	177.850,00
11	1010302001	Kertas HVS	34	2.475.975,00
12	1010302002	Berbagai Kertas	39	1.837.425,00
	1010302003	Kertas Cover	1	50.850,00
13	1010302004	Amplop	3	369.000,00
14	1010304004	Tinta/Toner Printer	29	2.800.550,00
15	1010306010	Batu Baterai	26	340.550,00
16	1010307006	Atribut	8.878	1.283.324.500,00
17	1010309001	Meterai	273	2.824.500,00
18	1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	15	361.250
Total			9.621	1.296.230.650,00

Tanah

Rp562.424.000,00

C.8 Tanah

Saldo aset tetap berupa Tanah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp562.424.000,00 dan Rp562.424.000,00. Saldo Tanah sebesar Rp562.424.000,00 merupakan transfer masuk dari Bawaslu Republik Indonesia atas hibah tanah Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Peralatan dan Mesin

Rp14.443.167.801,00

C.9 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp14.443.167.801,00 dan Rp11.521.222.293.

Rincian peralatan dan mesin yang ada, adalah sebagai berikut:

Kode Barang	Jenis BMN	Jumlah	Nominal (Rp)
-------------	-----------	--------	--------------

3.10.01.02.003	Note Book	2	68.154.000,00
3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television System	10	143.253.591,00
3.05.02.04.006	Kipas Angin	2	3.397.500,00
3.01.03.04.001	Transportable Generating Set	9	216.298.000,00
3.05.01.05.017	Mesin Absensi	1	11.700.000,00
3.05.02.06.080	Bracket Standing Peralatan	1	1.000.000,00
3.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	1	3.795.000,00
3.05.02.04.001	Lemari Es	5	10.001.000,00
3.06.02.07.005	Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	8	38.487.500,00
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	109	285.833.807,00
3.06.01.02.128	Camera Digital	21	260.322.112,00
3.05.02.06.087	Neon Box	1	2.750.000,00
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	29	326.251.050,00
3.05.02.01.006	Bangku Panjang Besi/Metal	6	3.000.000,00
3.05.01.05.058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	17	28.821.500,00
3.07.01.01.171	Thermometer Gun	9	25.650.000,00
3.05.01.05.081	Papan Pengumuman	1	5.500.000,00
3.10.01.02.001	P.C Unit	146	1.212.681.795,00
3.10.01.02.002	Lap Top	98	1.071.677.154,00
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	81	248.557.657,00
3.05.02.01.005	Sice	19	84.409.086,00
3.10.02.04.006	Repeater and Transciever	1	2.500.000,00
3.02.01.01.003	Station Wagon	7	4.018.700.000,00
3.05.01.05.010	White Board	6	7.650.000,00

3.05.02.06.002	Televisi	12	122.078.400,00
3.05.01.05.015	Alat Penghancur Kertas	10	39.870.000,00
3.05.02.01.008	Meja Rapat	32	148.849.987,00
3.05.02.06.016	Mic Conference	10	97.195.000,00
3.05.02.06.046	Handy Cam	2	18.971.107,00
3.06.01.02.165	Camera Conference	3	42.017.600,00
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	3	49.384.500,00
3.10.02.04.015	Firewall	1	34.500.000,00
3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang)	10	3.361.800.000
3.05.01.04.004	Rak Kayu	3	5.900.000,00
3.05.02.04.004	A.C. Split	143	507.028.321,00
3.05.02.06.077	Bendera Negara	3	1.485.000,00
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	445	552.375.952,00
3.10.01.02.009	Tablet PC	5	39.244.000,00
3.05.02.06.030	Tiang Bendera	10	4.950.000,00
3.06.02.01.999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	10	32.496.000,00
3.10.02.04.003	Hub	1	1.485.000,00
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	32	64.730.570,00
3.06.01.01.088	Voice Recorder	19	19.981.216,00
3.05.01.04.007	Brandkas	10	46.125.218,00
3.05.02.01.004	Kursi Kayu	13	50.623.000,00
3.05.02.06.008	Sound System	15	138.672.117,00
3.10.02.04.002	Router	1	6.000.000,00
3.10.02.04.026	Acces Point	4	4.920.000,00
3.07.01.01.127	Kursi Dorong	2	2.780.563,00
3.06.01.02.118	Head Set	2	10.767.000,00
3.05.01.04.003	Rak Besi	51	86.405.250,00
3.06.01.02.043	Stabilizing Amplifier	1	7.976.428,00

3.05.02.04.005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2	14.749.000,00
3.05.01.05.052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	1	5.000.000,00
3.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	99	196.507.000,00
3.05.01.05.001	Tabung Pemadam Api	4	8.750.000,00
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	228	391.290.895,00
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	22	234.867.925,00
3.06.03.47.002	Genset	1	13.000.000
Total		1.800	14.443.167.801,00

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	11.521.222.293,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	4.203.290.000,00
Transfer Masuk	111.911.000,00
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	13.450.000,00
Perolehan Lainnya	135.255.563,00
Jumlah Mutasi Tambah	15.985.128.856,00
Mutasi Kurang	
Penghentian Aset dari Penggunaan	(1.541.861.055,00)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(100.000,00)
Jumlah Mutasi Kurang	1.541.961.055,00
Saldo per 31 Desember 2024	14.443.167.801,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(9.270.898.280,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	5.172.178.521,00

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa pembelian, terdiri atas:

*Tabel Mutasi Pembelian
Peralatan dan Mesin TA. 2024*

Kode Barang	Jenis BMN	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)
3.02.01.01.003	Station Wagon	6	3.620.400.000,00
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	16	63.100.000,00
3.05.01.04.005	Filling Cabinet Besi	2	8.000.000,00
3.05.01.05.015	Alat Penghancur Kertas	10	39.870.000,00

3.05.02.01.008	Meja Rapat	2	35.000.000,00
3.05.02.06.008	Sound System	2	17.375.000,00
3.05.02.06.046	Handy Cam	1	12.000.000,00
3.06.01.02.128	Camera Digital	11	164.675.000,00
3.10.01.02.001	P.C. Unit	5	59.850.000,00
3.10.01.02.002	Lap Top	12	183.020.000,00
Total		66	4.203.290.000,00

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa transfer masuk merupakan transfer BMN yang berasal dari Bawaslu Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel Mutasi Transfer Masuk
Peralatan dan Mesin TA. 2024*

Kode Barang	Jenis BMN	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)
3.06.01.02.118	Head Set	2	10.767.000,00
3.06.02.01.999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	9	18.981.000,00
3.10.01.02.003	Note Book	2	68.154.000,00
3.10.01.02.009	Tablet PC	1	14.009.000,00
Total			111.911.000,00

Mutasi transaksi koreksi pencatatan nilai bertambah merupakan tindak lanjut atas konsep temuan Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Bawaslu Tahun Anggaran 2024, terdapat belanja *software* yang belum dikapitalisasi pada aplikasi SAKTI sehingga perlu dilakukan koreksi nilai bertambah terhadap aset dengan rincian sebagai berikut:

Kode Barang	Jenis BMN	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)
3.06.02.01.999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	9	12.105.000,00
3.10.01.02.009	Tablet PC	1	1.345.000,00
Total			13.450.000,00

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa reklasifikasi masuk, merupakan barang yang diperoleh oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sebagai *reward* dari bank atas penempatan dana hibah Pemilihan Kepala

Daerah pada rekening bank tersebut. Rincian Perolehan Lainnya sebesar Rp156.255.563,00 adalah sebagai berikut:

*Tabel Mutasi Perolehan Lainnya
Peralatan dan Mesin TA. 2024*

Kode Barang	Jenis BMN	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)
3.05.02.01.005	Sice	1	6.800.000,00
3.05.02.04.001	Lemari Es	5	10.001.000,00
3.05.02.04.004	A.C. Split	1	6.300.000,00
3.05.02.04.005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2	14.749.000,00
3.06.02.01.999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	1	1.500.000,00
3.07.01.01.127	Kursi Dorong	2	2.780.563,00
3.10.01.02.002	Lap Top	9	69.225.000,00
3.10.01.02.009	Tablet PC	4	23.900.000,00
Total		25	135.255.563,00

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa penghentian aset dari penggunaan merupakan transaksi atas penghentian aset dengan kondisi rusak berat dari penggunaan untuk kemudian dilakukan pemindahtanganan dan penghapusan dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel Mutasi Penghentian Aset dari Penggunaan
Peralatan dan Mesin TA. 2024*

Kode Barang	Jenis BMN	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)
3.01.03.04.001	Transportable Generating Set	1	9.466.000,00
3.05.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 inci)	2	3.960.000,00
3.05.01.01.004	Mesin Ketik Listrik	1	1.980.000,00
3.05.01.03.007	Mesin Fotocopy Folio	2	99.000.000,00
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	3	10.346.000,00
3.05.01.04.003	Rak Besi	3	4.450.000,00
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	1	1.500.000,00
3.05.01.04.007	Brandkas	1	3.950.000,00
3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television System	2	34.850.000,00

3.05.01.05.010	White Board	1	750.000,00
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	11	106.409.999,00
3.05.01.05.058	Focusing Screen/Layar LCD Projector)	4	5.180.000,00
3.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	6	10.840.000,00
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	25	50.310.000,00
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	140	113.623.500,00
3.05.02.02.004	Kursi Kayu	8	4.000.000,00
3.05.02.01.006	Bangku Panjang Besi/Metal	4	2.000.000,00
3.05.02.01.008	Meja Rapat	1	4.500.000,00
3.05.02.03.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum cleaner	1	3.500.000,00
3.05.02.03.999	Alat Pembersih Lainnya	2	1.154.000,00
3.05.02.04.004	A.C Split	12	38.759.250,00
3.05.02.04.006	Kipas Angin	1	1.897.500,00
3.05.02.05.002	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	460.000,00
3.05.02.06.002	Televisi	1	3.500.000,00
3.05.02.06.008	Sound System	2	22.500.000,00
3.05.02.06.016	Mic Conference	1	9.875.000,00
3.05.02.06.020	Camera Video	1	14.850.000,00
3.05.02.06.031	Pataka	6	8.910.000,00
3.05.02.06.058	Gordyin/Kray	1	16.720.000,00
3.05.02.06.077	Bendera Negara	3	1.485.000,00
3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	6	12.870.000,00
3.06.01.01.088	Voice Recorder	1	1.981.216,00
3.06.01.01.091	Digital LED Running Text	1	14.650.000,00
3.06.01.02.128	Camera Digital	1	9.900.000,00
3.06.01.04.045	Mesin Barcode	1	5.000.000,00
3.06.02.01.003	Pesawat Telephone	1	1.884.300,00
3.06.02.07.005	Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	2	9.750.000,00
3.07.01.01.171	Thermometer Gun	1	2.850.000,00
3.10.01.02.002	P.C Unit	47	320.843.800,00
3.10.01.02.002	Lap Top	33	258.796.690,00

3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	135	189.665.000,00
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	17	117.968.000,00
3.10.02.04.002	Router	1	2.475.000,00
3.10.02.04.006	Repeater And Transciever	1	2.500.000,00
Total		496	1.541.861.055.00

Mutasi transaksi koreksi pencatatan nilai berkurang merupakan tindak lanjut atas konsep temuan Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Bawaslu Tahun Anggaran 2024, sehingga dilakukan koreksi terhadap perangkat PPID dengan rincian sebagai berikut:

Kode Barang	Jenis BMN	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)
3.06.02.01.999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	9	90.000,00
3.10.01.02.009	Tablet PC	1	10.000,00

*Gedung dan
Bangunan
Rp895.705.000,00*

C.10 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp895.705.000,00 dan Rp895.705.000,00. Gedung dan Bangunan senilai Rp895.705.000,00 merupakan transfer masuk dari Bawaslu Republik Indonesia atas hibah bangunan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Berita Acara Transfer Barang Milik Negara dari Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum kepada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 50/PL.09/KB/08/2023 tanggal 24 Agustus 2023.

*Jalan, Jaringan, dan
Irigasi
Rp30.500.000,00*

C.11 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp30.500.000,00 dan Rp30.500.000,00. Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dirincikan sebagai berikut:

Uraian	Nominal (Rp)
Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Sedang	30.500.000,00

Total	30.500.000,00
--------------	----------------------

Instalasi Lain-Lain merupakan Aset berupa instalasi jaringan internet yang perolehannya berasal dari transfer masuk dari pusat.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 1 Januari 2023	30.500.000,00
Mutasi Tambah	
Penambahan Jaringan Teknologi Informasi	0,00
Mutasi Kurang	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	30.500.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(13.906.250,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	16.593.750,00

Aset Tetap Lainnya
Rp199.033.900,00

C.8 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp199.033.900,00 dan Rp199.033.900,00. Aset tetap lainnya ini merupakan renovasi atas gedung kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebagaimana rincian berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 1 Januari 2024	199.033.900,00
Mutasi Tambah	0,00
Mutasi Kurang	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	199.033.900,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2024	199.033.900,00

Akumulasi
Penyusutan
Rp9.361.659.529,00

C.9 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp9.361.659.529,00 dan Rp9.594.709.299. Nilai Akumulasi Penyusutan tersebut terdiri atas:

Keterangan	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	9.270.898.280,00	9.522.707.216

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	76.854.999,00	58.658.333
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	13.906.250,0	13.343.750
Total	9.361.659.529,00	9.594.709.299

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024:

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akm Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	14.443.167.801,00	(9.270.898.280,00)	5.172.269.521,00
2	Gedung dan Bangunan	895.705.000	(76.854.999,00)	818.850.001,00
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	30.500.000	(13.906.250,00)	16.593.750,00
Total		15.369.372.801,00	(9.361.659.529,00)	6.007.713.272,00

Aset Tak Berwujud
Rp438.664.000,00

C.10 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2021 adalah Rp438.664.000,00 dan Rp438.664.000,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Rincian aset tak berwujud yang ada, adalah sebagai berikut:

Kode Barang	Jenis BMN	Nilai Perolehan (Rp)
8.01.01.01.001	Software Komputer	438.664.000,00
Total		438.664.000,00

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 1 Januari 2024	438.664.000,00
Mutasi Tambah	

Pengembangan Nilai Aset	0,00
Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	438.664.000,00
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Saldo Per 31 Desember 2024	438.664.000,00
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	(488.744.000,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	0,00

Akumulasi

Penyusutan dan Aset

Lainnya

Rp438.664.000,00

C.12 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp438.664.000,00 dan Rp423.984.000,00. Rincian akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya terdiri atas:

Keterangan	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
A. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00
B. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya		
Akumulasi Amortisasi Software	(438.664.000,00)	(369.659.000,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0,00	(54.325.000,00)
Jumlah	(438.664.000,00)	(423.984.000,00)

Total Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(438.664.000,00)	(423.984.000,00)
---	-------------------------	-------------------------

*Utang Kepada Pihak
Ketiga
Rp1.224.509.863,00*

C.13 Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.224.509.863,00 dan Rp19.681.877,00. Utang kepada pihak ketiga ini terdiri dari:

Keterangan	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0,00	0,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	1.189.787.931,00	19.681.877,00
Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	34.721.932,00	0,00
Total	1.224.509.863,00	19.681.877,00

Belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp1.189.787.931,00 merupakan pembayaran atas anggaran tahun 2024 yang belum dibayarkan kepada penerima. Rincian belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp1.189.787.931,00 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	Tagihan Listrik dan Air	26.456.790,00	Tagihan keluar di bulan Januari Tahun 2025
2.	Pembayaran Paket Meeting Fullboard Golden Tulip Balikpapan Hotel & Suites	123.200.000,00	Sudah diinput di sistem perbankan, namun approval pembayaran di Januari 2025

3.	Pembayaran Paket Meeting Fullboard Grand Jatra Hotel Balikpapan	62.900.000,00	Lupa dibayarkan karena tidak ada konfirmasi dari pihak ketiga
4.	Pembayaran Honorarium Sekretariat Panwascam se-Kabupaten Kutai Timur Periode Desember 2024	239.100.000,00	Pemahaman Bawaslu Kabupaten Kutai Timur bahwa honor dibayarkan di 1 Januari 2025
5.	Pembayaran Belanja Jasa Lainnya	81.000.000,00	Tidak sempat melakukan pembayaran di Desember 2024 karena tagihan keluar di tanggal 31 Desember 2024
6.	Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	128.622.700,00	Dokumen Pertanggungjawaban diterima Januari 2025
7.	Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	340.000,00	Dokumen Pertanggungjawaban diterima Januari 2025
8.	Pembayaran Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	8.450.000,00	Dokumen Pertanggungjawaban diterima Januari 2025
9.	Pembayaran Perjalanan Dinas Panwaslu Kecamatan se-Kota Bontang	287.470.000,00	Tidak sempat melakukan pembayaran di Desember 2024
10.	Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota Bawaslu Kota Bontang	54.990.000,00	Tidak sempat melakukan pembayaran di Desember 2024
11.	Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa Bawaslu Kota Bontang	173.658.441,00	Tidak sempat melakukan pembayaran di Desember 2024
12.	Pembayaran Belanja Jasa Profesi untuk Saksi Ahli Penindakan Pelanggaran Administrasi dan Pidana	3.600.000,00	Tidak sempat melakukan pembayaran di Desember 2024
Total		1.189.787.931,00	

Utang kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp34.721.932,00 berasal dari transaksi Hibah Pemilihan Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengalami retur ke rekening pengirim. Rincian dari utang kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp34.721.932,00 adalah sebagai berikut:

No		Nominal (Rp)	Keterangan
----	--	--------------	------------

1.	Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	30.642.000,00	Kelebihan transfer pengembalian uang muka dari 9 kecamatan (Kecamatan Sangatta Utara, Muara Wahau, Teluk Pandan, Long Mesangat, Telen, Muara Bengkal, Busang, Kaubun, dan Batu Ampar)
2.	Bawaslu Kabupaten Berau	632.640,00	Retur lewat bulan atas transfer honor PTPS dan uang pengganti makan PTPS
3.	Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara	267.500,00	Retur atas pembayaran uang harian dan uang transport pelantikan PKD
4.	Bawaslu Kota Balikpapan	3.179.792,00	Pengembalian Dana PDH ke PDHL, namun masih ada pungutan pajak terutang
Total		34.721.932,00	

Utang Jangka Pendek Lainnya
Rp114.295.985,00

C.14 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp114.295.985,00 dan Rp34.500,00. Yang dimaksud utang jangka pendek lainnya adalah utang pajak bendahara yang belum disetorkan.

Rincian dari utang pajak bendahara yang belum disetorkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Rupiah Murni (Rp)	HLD (Rp)
BPP Bawaslu Kota Balikpapan	0,00	3.492.292,00
BPP Bawaslu Kabupaten Berau	0,00	90.000,00
BPP Bawaslu Kota Bontang	0,00	18.431.000,00
BPP Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	0,00	2.070.000,00
BPP Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	120.500,00	303.120,00
BPP Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	0,00	78.989.477,00
BPP Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	2.105.549,00	8.249.047,00

BPP Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara	0,00	445.000,00
Total	2.226.049,00	112.069.936,00

Ekuitas

Rp106.980.982.048,00

C.15 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp106.980.982.048,00 dan Rp128.508.324.322,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset sebesar Rp108.319.787.896,00, dan kewajiban sebesar Rp1.338.805.848,00. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNPB

Rp2.275.566,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.275.566,00 dan Rp1.267.267,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023

Jenis Pendapatan	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan / Penurunan (%)
Pendapatan Jasa Giro	2.275.566,00	1.267.267,00	79,56
Jumlah	2.275.566,00	1.267.267,00	79,56

Realisasi Pendapatan Jasa Giro per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.275.566,00 merupakan pendapatan jasa giro rekening dana pemilu Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Kalimantan Timur bulan Januari s.d. Desember 2024 dan pendapatan jasa giro rekening dana hibah pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Jumlah (Rp)
Setor Jasa Giro Rekening Panwaslu se- Kota Balikpapan	29/02/2024	6B39E7QLUOQQBVBE	1.062,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Kubar Tahun 2024	23/04/2024	02FB01JNFUVS5P3L	414.529,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Paser Tahun 2024	23/04/2024	2F7AC61QV3RQ6P5A	12.058,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Kubar Tahun 2023	23/04/2024	FBFAD0NA04DFOP0N	174.416,00
Setor Jasa Giro Panwaslu	25/04/2024	48FF355DF99G0ETP	22.253,00

Kecamatan se-Kabupaten Sepaku - PPU tahun 2023			
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sepaku - PPU tahun 2024	25/04/2024	B7FC348VVEN3JERF	25.249,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kutim Tahun 2024	25/04/2024	DB1333CIFK4N6E42	469.711,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan Penajam - PPU Tahun 2024	29/04/2024	0086855DF99L5IAG	70.156,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan Waru - PPU Tahun 2024	29/04/2024	5DF9B0NA04DN4KL0	28.687,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan Babulu - PPU Tahun 2024	29/04/2024	909B00NA04DN4KSL	44.550,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Paser Tahun 2024	30/04/2024	DBA8A6U8EUEE7IO3	22.783,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024	30/04/2024	11E4361QV3S1Q9GE	645.346,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kutai Barat	30/04/2024	BF3BF61QV3S1Q9QB	45.243,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kukar Tahun 2024	30/04/2024	5E23A6U8EUEE783O	197.612,00
Setor Jasa Giro atas RDP Bawaslu Kabupaten Kutai Timur bulan	18/09/2024	D82B66U8EUT05SM9	76.850,00

Februari s.d. Maret 2023			
Setor Jasa Giro Ad-Hoc se-Kota Balikpapan bulan Juli s.d. Desember 2024	31/12/2024	E8A823CIFKSOJA4G	25.061,00
Total			2.275.566,00

Tidak terdapat perbedaan jumlah Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) pada Laporan Realisasi Anggaran dibandingkan jumlah Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) pada Laporan Operasional per 31 Desember 2024.

Beban Pegawai

Rp12.162.684.662,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp12.162.684.662,00 dan Rp8.698.974.660,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan Beban Pegawai sebesar 39,82% dibanding dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2023. Kenaikan beban pegawai disebabkan oleh:

1. Penambahan jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024; dan
2. Terdapat pegawai yang mengalami mutasi dari unit kerja lain ke Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

Uraian	Realisasi 31 Des 2024 (Rp)	Realisasi 31 Des 2023 (Rp)	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.176.472.110,00	974.780.820,00	20,69

Beban Pembulatan Gaji PNS	17.546,00	16.994,00	3,25
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	39.395.680,00	33.236.990,00	18,53
Beban Tunj. Anak PNS	8.472.974,00	7.114.602,00	19,09
Beban Tunj. Struktural PNS	78.890.000,00	65.310.000,00	20,79
Beban Tunj. Fungsional	16.982.000,00	35.560.000,00	(52,24)
Beban Tunj. PPh PNS	67.718.427,00	67.654.300,00	0,09
Beban Tunj. Beras PNS	41.279.400,00	38.165.340,00	8,16
Beban Uang Makan PNS	118.851.000,00	166.098.000,00	(28,45)
Beban Tunjangan Umum PNS	78.775.000,00	48.450.000,00	62,55
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	6.256.155.050,00	6.053.248.700,00	3,35
Beban Gaji Pokok PPPK	1.183.708.400,00	23.732.000,00	4.887,82
Beban Pembulatan Gaji PPPK	15.937,00	160,00	9.860,63
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	78.325.840,00	2.373.200,00	3.200,43
Beban Tunj. Anak PPPK	19.893.920,00	237.320,00	8.282,74
Beban Tunj. Fungsional PPPK	88.200.000,00	4.320.000,00	1.941,67
Beban Tunj. Beras PPPK	67.278.180,00	1.448.400,00	4.545
Beban Uang Makan PPPK	114.076.000,00	2.886.000,00	3.852,74
Beban Tunj. Umum PPPK	5.365.000,00	0,00	-
Beban Uang Lembur	28.734.000,00	36.817.000,00	(21,95)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1.478.355.034,00	1.116.123.044,00	32,45
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1.215.723.164,00	23.341.362,00	5.108,45
Jumlah Beban Kotor	12.162.684.662,00	8.700.914.232,00	39,79
Pengembalian Beban Pegawai	(0,00)	(1.939.572,00)	(100)
Jumlah Beban Pegawai	12.162.684.662,00	8.698.974.660,00	39,77

Tidak terdapat perbedaan jumlah realisasi belanja pegawai dibandingkan jumlah beban pegawai per 31 Desember 2024. Hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut:

Mutasi Tambah	
Belanja Pegawai (LRA)	12.162.684.662,00
Jumlah Mutasi tambah	12.162.684.662,00
Mutasi Kurang	
Jurnal Kekurangan Uang Kehormatan	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Jumlah Beban Pegawai per 31 Des 2023	12.162.684.662,00

Beban Persediaan

Rp1.296.230.650,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.296.230.650,00 dan Rp27.430.900,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan mengalami kenaikan sebesar 4.625,44% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 terdapat peningkatan pemakaian barang persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi 31 Des 2024 (Rp)	Realisasi 31 Des 2023 (Rp)	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	1.296.230.650,00	26.670.900,00	4.760,09
Beban Persediaan Lainnya	0,00	760.000,00	(100)
Jumlah	1.296.230.650,00	27.430.900,00	4.625,44

Terdapat perbedaan jumlah realisasi belanja barang persediaan dibandingkan jumlah beban persediaan per 31 Desember 2024. Hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut:

Saldo Awal	
Barang Konsumsi	1.286.676.600,00
Persediaan Lainnya	0,00
Mutasi Tambah:	
Belanja Barang Persediaan – Barang Konsumsi	16.685.050,00
Perolehan Lainnya	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	1.303.361.650,00
Mutasi Kurang	
Sisa Persediaan Per 31 Desember 2024	
1. Barang Konsumsi	7.131.000,00
2. Persediaan Lainnya	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	7.131.000,00
Jumlah Beban Persediaan per 31 Des 2024	1.296.230.650,00

Beban Barang dan Jasa
Rp118.369.632.232,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp118.369.632.232,00 dan Rp67.005.614.996,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 terjadi kenaikan Beban Barang dan Jasa sebesar 76,66% dibanding dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2023. Kenaikan paling signifikan terjadi pada beban barang non operasional lainnya yaitu sebesar 64.205,49%, Hal tersebut dapat terjadi karena pada periode tahun 2024 diselenggarakan Pemilu dan Pilkada sehingga realisasi belanja sampai ke tingkat PTPS, sedangkan pada tahun 2023 hanya terjadi tahapan pemilu saja.

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian Jenis Beban	Realisasi 31 Des 2024 (Rp)	Realisasi 31 Des 2023 (Rp)	Naik (Turun) %
---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------

Beban Keperluan Perkantoran	7.906.905.010,00	9.585.950.260,00	(17,52)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0,00	104.000,00	(100)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	468.504.550,00	626.420.000,00	(25,21)
Beban Barang Operasional Lainnya	706.744.274,00	203.496.000,00	247,30
Beban Bahan	21.975.401.781,00	5.234.254.308,00	319,84
Beban Honor Output Kegiatan	51.747.598.000,00	34.487.195.000,00	50,05
Beban Barang Non Operasional Lainnya	3.086.663.349,00	4.800.000,00	64.205,49
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	27.000.000,00	35.800.000,00	(24,58)
Beban Langganan Listrik	836.540.805,00	742.860.598,00	12,61
Beban Langganan Air	244.027.938,00	208.631.673,00	16,97
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.552.500,00	3.774.448,00	(58,87)
Beban Sewa	26.255.467.270,00	15.938.146.520,00	64,73
Beban Jasa Profesi	1.866.846.463,00	231.400.000,00	706,76
Beban Jasa Lainnya	3.369.642.000,00	0,00	-
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	1.300.000,00	6.019.496	(78,40)
Jumlah Beban Kotor	118.494.193.940,00	67.308.852.303,00	115,05
Pengembalian Beban	(124.561.708,00)	(34.037.307,00)	265,96
Jumlah Beban Barang dan Jasa	118.369.632.232,00	67.274.14.996,00	115,25

Terdapat perbedaan jumlah realisasi belanja barang dan jasa dibandingkan jumlah beban barang dan jasa per 31 Desember 2024.

Hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa	118.587.068.792,00
Mutasi Tambah	
Belanja yang Masih Harus Dibayar	
Belanja Honor Output Kegiatan	239.100.000,00
Belanja Langganan Listrik	17.871.121,00
Belanja Langganan Air	8.585.669,00
Belanja Jasa Profesi	3.600.000,00
Belanja Jasa Lainnya	81.000.000,00

Beban Sewa dari Sewa Tahun yang Lalu	431.450.000,00
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	1.300.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	119.369.975.582,00
Mutasi Kurang	
Jurnal Balik atas Beban Tahun yang Lalu	19.681.877,00
Belanja Barang Dibayar di muka	980.661.473,00
Jumlah Mutasi Kurang	1.000.343.350,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa Per 31 Des 2023	118.369.632.232,00

Beban Pemeliharaan
Rp1.906.456.273,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.906.456.273,00 dan Rp1.875.870.407,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Per 31 Desember 2024 terdapat kenaikan Beban Pemeliharaan sebesar 1,55% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2023. Kenaikan terdapat pada beban pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar 10,55% yang dikarenakan penambahan anggaran pemeliharaan dan kenaikan belanja pemeliharaan mengikuti harga wajar pasar. Rincian beban pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian Jenis Beban	Realisasi 30 September 2023	Realisasi 30 September 2022	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	117.949.500,00	259.476.700,00	(54,54)
Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	(1.000.000,00)	-

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.788.506.773,00	1.617.844.707,00	10,55
Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	(451.000,00)	-
Jumlah	1.906.456.273,00	1.875.870.407,00	1,55

Tidak Terdapat perbedaan jumlah realisasi Belanja Pemeliharaan pada Laporan Realisasi Anggaran dibandingkan jumlah Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional per 31 Desember 2024.

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan Dinas
Rp141.855.883.629,00*

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp141.855.883.629,00 dan Rp47.174.374.700,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2023, Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 204,05%, disebabkan karena terdapat pelaksanaan pemilihan umum pada bulan Februari 2024, realisasi perjalanan dinas dilakukan sampai ke tingkat PTPS guna melakukan monitoring pemilihan umum 2024. Peningkatan signifikan terjadi pada beban perjalanan dinas paket meeting luar kota sebesar 1.913,19%, hal ini dikarenakan pada tahun 2024 dilaksanakan tahapan pemilihan kepala daerah 2024 dan banyak terdapat kegiatan paket meeting luar kota yang direalisasikan di tahun anggaran 2024.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian Jenis Beban	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------

Beban Perjalanan Dinas Biasa	39.300.897.631,00	20.198.145.239,00	94,58
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	52.381.083.179,00	22.996.779.534,00	127,78
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	45.226.240.400,00	3.887.513.800,00	1.063,37
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.939.918.034,00	295.050.140,00	1.913,19
Jumlah Beban Kotor	142.848.139.244,00	47.377.488.713	201,51
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas	(992.255.615,00)	(202.114.013,00)	390,94
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	141.855.883.629,00	47.175.374.700,00	204,05

Terdapat perbedaan jumlah realisasi belanja perjalanan dinas dibandingkan jumlah beban perjalanan dinas per 31 Desember 2024, hasil mutasi beban yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah:

Belanja Perjalanan Dinas Rp 142.008.508.103,00

Belanja yang Masih Harus Dibayar

Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 302.281.141,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 326.060.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp 202.840.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp 8.450.000,00

Jumlah Mutasi Tambah Rp 142.738.489.244,00

Mutasi Kurang:

Pengembalian atas Beban Perjalanan Biasa Rp 29.857.615,00

Pengembalian atas Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 953.898.000,00

Pengembalian atas Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp 8.500.000,00

Jumlah Mutasi Kurang Rp 992.255.615,00

Jumlah Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 Rp 141.855.883.629,00

*Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp1.314.640.792,00*

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.314.640.792,00 dan Rp1.182.981.300,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	Realisasi 31 Des 2024 (Rp)	Realisasi 31 Des 2023 (Rp)	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.270.744.489,00	1.029.829.062,00	23,39
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	18.196.666,00	9.098.333,00	100,00
Beban Penyusutan Jaringan	562.500,00	1.095.833,00	(48,67)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional	10.547.137,00	17.564.907,00	(40,47)
Jumlah Penyusutan	1.298.592.417,00	1.075.588.135,00	(22,92)
Beban Amortisasi Software	14.680.000,00	125.393.165,00	(88,29)
Jumlah Amortisasi	14.680.000,00	125.393.165,00	(88,29)

Jumlah Penyusutan dan Amortisasi	1.314.640.792,00	1.182.981.300,00	11,13
---	-------------------------	-------------------------	--------------

*Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp0,00*

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan (Rp10.000,00). Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

*Surplus (Defisit)
Pelepasan Aset
(Rp3.850.493,00)*

D.9 Surplus (Defisit) Pelepasan Aset

Pos Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan pelepasan aset dan beban pelepasan aset selama satu periode pelaporan. Defisit dari pelepasan aset adalah selisih kurang antara pendapatan pelepasan aset dan beban pelepasan aset selama satu periode pelaporan. Surplus dari Kegiatan Operasional pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar (Rp3.850.493,00) dan Rp0,00. Rincian Kegiatan Operasional adalah sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 31 Des 2024 (Rp)	Realisasi 31 Des 2023 (Rp)	Naik (Turun) %
Pendapatan Pelepasan Aset	5.000.000,00	0,00	-
Beban Pelepasan Aset	8.850.493,00	0,00	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(3.850.493,00)	0,00	-

Surplus dari Pelepasan Aset merupakan pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya sebesar (Rp3.850.493,00) yang terdiri dari:

- a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.000.000,00 merupakan pendapatan dari pemindahtanganan melalui penjualan (lelang) atas BMN sejumlah 501 unit sesuai Surat Persetujuan Pemindahtanganan nomor 6961.1/PL.08/K1/07/2024. Atas lelang tersebut telah terbit risalah lelang nomor 700/13.02/2024-01;
- b. Beban Pelepasan Aset sebesar Rp8.850.493,00 merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat yang masih memiliki sisa masa manfaat. Atas sisa manfaat tersebut, diakui sebagai beban pelepasan aset.

*Surplus dari Kegiatan
Non Operasional
Rp1.552.759.633,00*

D. 10 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.552.759.633,00 dan Rp5.978.130,00. Rincian Kegiatan Non Operasional adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Des 2024 (Rp)	Realisasi 31 Des 2023 (Rp)	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.552.759.633,00	5.978.130,00	25.874
Jumlah Pendapatan	1.552.759.633,00	5.978.130,00	25.874
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1.552.759.633,00	5.978.130,00	25.874

Surplus dari Kegiatan Non Operasional merupakan pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp1.552.759.633,00 yang terdiri dari:

- a. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp39.628.407,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Jumlah (Rp)
Pengembalian Tunjangan Fungsional a.n. Lely Febriyanti	23/01/2024	D7AC16U8EU52S72P	12.100.000,00
Pengembalian Tukin a.n. Lely Febriyanti	23/01/2024	08C9C48VVEDTL7GO	22.954.998,00
Pengembalian Uang Makan a.n. Lely Febriyanti	23/01/2024	9B5238N3EJ9RM995	3.304.100,00
Kelebihan Pembayaran Uang makan PNS Desember 2023	30/01/2024	CB85A1JNFUN5N3R5	192.400,00
Kelebihan Pembayaran Uang Lembur PNS Desember 2023	30/01/2024	82C4D61QV3J3O4H6	257.750,00
Pengembalian Tukin PNS Kab/Kota Desember 2023 a.n. Jainal Abidinsyah, dkk.	18/12/2024	865371JNFVNIMLUC	308.298,00
Pengembalian Tukin PPPK Kab/Kota Desember 2023 a.n. Firanty Maulidani Anshori	18/12/2024	BDF1A7QLUPO9HML5	43.905,00
Pengembalian Tukin PNS Provinsi Desember 2023 a.n. Ahmad Jeri, dkk.	18/12/2024	6D5BF7QLUPO9HL3A	466.956,00
Total			39.628.407,00

- b. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp1.376.575.663,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Jumlah (Rp)
Pengembalian Belanja Perdin LS sebelum milik Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Paser	05/01/2024	31C2D6U8EU4ORRIL	256.900.000,00
Pengembalian Belanja Perdin LS sebelum milik Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Paser	05/01/2024	4B2C83CIFJR77SQR	6.520.000,00
Pengembalian Belanja Perdin LS sebelum milik Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Paser	05/01/2024	6AC2261QV3ICEQ7G	1.650.000,00

Pengembalian Perjalanan Dinas Publikasi Kampanye	22/01/2024	9D6618N3EJ9SQ737	1.200.000,00
Pengembalian Perjalanan Dinas Logistik Luar Daerah	22/01/2024	087B161QV3INJ6JG	3.137.118,00
Pengembalian Perjalanan Dinas Pengawasan Kampanye	22/01/2024	A7D260NA044D56HE	18.300.000,00
Pengembalian Perjalanan Dinas Faskor Bawaslu RI	22/01/2024	25DEF0NA044D5AOE	6.884.473,00
Perjalanan Dinas Pengawasan Logistik Dalam Kota	22/01/2024	0A1723CIFJRIC45T	1.500.000,00
Pengembalian Perjalanan Dinas Publikasi Logistik	22/01/2024	4ED6E2G4VP960KBE	600.000,00
Pengembalian Perjalanan Dinas Faskor Bawaslu Provinsi	22/01/2024	90D9761QV3INJBPO	30.630.738,00
Pengembalian Perjalanan Dinas Faskor	22/01/2024	4F2B03CIFJRICBAV	16.536.767,00
Pengembalian Perjalanan Dinas Perdin Gakummdu Tahapan Kampanye	22/01/2024	B8C4648VVEDUP8G2	101.500,00
Pengembalian Perjalanan Dinas Undangan Terkait Kampanye	22/01/2024	B42AD0NA044D5A0C	4.699.500,00
Pengembalian Kompensasi 30% perjalanan dalam rangka supervisi terkait pemetaan potensi rawan calon TMS menjelang penetapan DCT Anggota DPRD tingkat Kab/kota	30/01/2024	5017E3CIFJRUAURO	536.700,00
Pengembalian 30% perjalanan dinas ke Balikpapan dalam rangka menghadiri undangan Bawaslu RI kegiatan Rapat kerja teknis penguatan kelembagaan Bawaslu di Bidang hukum sebagai pemberi keterangan di MK	30/01/2024	985BB61QV3J311CT	236.700,00
Pengembalian Uang Harian ke Balikpapan menghadiri undangan Bawaslu RI pada kegiatan Rapat Koordinasi nasional Netralitas TNI Polri ASN Pemilu tanggal 26 s.d. 29 Oktober 2023 a.n. Daini Rahmat	30/01/2024	62A961JNFUN5H2P8	60.000,00
Pengembalian Uang harian dan kompensasi 30% Supervisi/monitoring kesiapan personel Sentra	30/01/2024	9E2BC3CIFJRUB37B	1.702.500,00

penegakan Hukum terpadu (Gakkumdu) tahapan kampanye di Bawaslu Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu			
Pengembalian Transport perjalanan dinas ke Bekasi dalam rangka menghadiri undangan Bawaslu RI kegiatan Konsolidasi penyusunan laporan keuangan Bawalu Triwulan III tanggal 15 s.d 18 Oktober 2023 a.n. Dyah Ayu	30/01/2024	68AE31JNFUN5H4P1	193.000,00
Pengembalian TUP Bulan Desember Perjalanan Dinas Faskor Ke Provinsi	30/01/2024	048BA55DF90K2S8H	218.000,00
Pengembalian TUP Bulan Desember Perjalanan Dinas Faskor ke Provinsi	30/01/2024	BCDC92G4VP9ERTQ E	150.000,00
Pengembalian TUP Bulan Desember 2023 Perjalanan Dinas Faskor Bawaslu RI	30/01/2024	25A0A8N3EJA5MULR	200.000,00
Pengembalian TUP Bulan Deseember 2023 Belanja Perjalanan dinas biasa dalam rangka Pengawasan Logistik	30/01/2024	E62297QLUONPA17C	676.457,00
Pengembalian TUP Bulan Deseember 2023 Perjalanan dinas dalam kota Pengawasan Kampanye	30/01/2024	DA35A3CIFJRR92BP	4.540.000,00
Pengembalian TUP Bulan Deseember 2023 Belanja Perjalanan dinas Faskor Bawaslu Provinsi	30/01/2024	242E661QV3J0G0QG	8.355.818,00
Pengembalian Perjalanan Dinas Publikasi dan Dolkumentasi Pengawasan Logistik (Kecamatan) Kabupaten Berau	10/02/2024	35F746U8EU7SMOUQ	25.850.000,00
Pengembalian Perjalanan Dinas Publikasi dan Dokumentasi Pengawasan Masa Kampanye (Kecamatan) Kabupaten Berau	10/02/2024	EEBE72G4VPBULO57	92.910.000,00
Pengembalian Pelayanan Operasional Perkantoran (Kecamatan) Kabupaten Berau	10/02/2024	6DCCF1JNFUPI8ORD	1.512.000,00

Pengembalian Perjalanan Dinas Fasilitas, Koordinasi, dan Pelaporan (Kecamatan) Kabupaten Berau	10/02/2024	48C206U8EU7SMOCC	52.410.000,00
Pengembalian RDP Perjalanan Dinas Dalam Verifikasi Faktual	29/02/2024	693C52G4VPCFU1EQ	900.000,00
Pengembalian RDP Langganan Air	29/02/2024	AEC351JNFUQ3GUTJ	5.771,00
Pengembalian RDP Internet	29/02/2024	444AC1JNFUQ3GVSQ	313.800,00
Pengembalian RDP Rapat Publikasi Kampanye	29/02/2024	80E6355DF93L4UM1	4.760.000,00
Pengembalian RDP Perjalanan Dinas dalam Kota	29/02/2024	F8B0661QV3M1I0P1	10.580.000,00
Pengembalian RDP Perjalanan Dinas Kampanye	29/02/2024	0E6F00NA047N3TCS	26.150.000,00
Pengembalian RDP Rapat Biasa	29/02/2024	750133CIFJUSAUQL	240.000,00
Pengembalian RDP Perjalanan Dinas Logistik	29/02/2024	D85E07QLUOQQC134	2.400.000,00
Pengembalian ke 2 Dana TUP Tahun 2023 Bawaslu Kab Kubar	17/04/2024	9D0D27QLUP0EJ0TE	41.473.895,00
Pengembalian LS Ad Hoc Tahun 2023	23/04/2024	8429955DF99DPPSM	51.457.000,00
Pengembalian LS Ad Hoc Tahun 2023	23/04/2024	7EA883CIFK4KVPU4	250.000,00
Pengembalian LS Ad Hoc Tahun 2023	23/04/2024	5A6B82G4VPI8IQHD	832.000,00
Pengembalian LS Ad Hoc Tahun 2023	23/04/2024	7C18A1JNFUVS5Q58	8.360.000,00
Pengembalian LS Ad Hoc Tahun 2023	23/04/2024	4D04C1JNFUVS5Q3K	40.280.000,00
Pengembalian LS Ad Hoc Tahun 2023	23/04/2024	F6EB355DF99DPQ20	9.650.000,00
Pengembalian LS Ad Hoc Tahun 2023	23/04/2024	995A348VVEN1CQ11	210.000,00
Pengembalian LS Ad Hoc Tahun 2023	23/04/2024	129B67QLUP0J0QNP	532.880.000,00
Pengembalian Pokja Gakkumdu Tahun 2023 Kabupaten Kutai Kartanegara	07/05/2024	374F56U8EUGODCEG	6.460.000,00
Pengembalian Pokja Gakkumdu Tahun 2023 Kabupaten Kutai Kartanegara	07/05/2024	C8A3555DF9BVJBDM	21.660.000,00
Pengembalian Transport Perjadin dalam rangka menghadiri Konsolidasi Nasional di Jakarta tgl 24 s.d. 29 Nov 2023 a.n. Daini Rahmat	08/05/2024	0911261QV3UD31KV	279.500,00
Pengembalian Tiket Perjadin dalam rangka menghadiri Undangan	08/05/2024	6C94948VVEPK9055	2.194.420,00

Bawaslu RI di Jakarta Tanggal 12 sd 14 Desember 2023 a.n. Yusuf			
Pengembalian Transport Perjadin dalam Rangka menghadiri undangan RI ke Manado Pada tgl 28 s.d. 1 Des 2023 a.n. Yusuf	08/05/2024	4C5D63CIFK77RVM0	164.480,00
Pengembalian BBM dalam rangka Memfasilitasi staf Bawaslu RI Ke Bandara APT Pranoto tgl 20 Okt 2023 a.n M. Azizu Malik Effendi	08/05/2024	2664D55DF9C0LQKE	250.000,00
Pengembalian Transport Perjadin dalam Rangka pengawasan Logistik Pemilu TA. 2024 di Pasuruan tgl 3 s.d. 6 Des 2023 a.n. Wamustofa Hamzah	08/05/2024	C84CC55DF9C0LSEE	200.000,00
Pengembalian Honor Pokja Gakkumdu Tahun 2023 Kabupaten Kutai Timur	13/05/2024	5E7291JNFV2E18OC	5.415.000,00
Pengembalian Honor Pokja Gakkumdu Tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Mahulu	13/05/2024	DB82C0NA04G5PAK1	902.500,00
Pengembalian Honor Pokja Gakkumdu Tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Mahulu	13/05/2024	0D9B97QLUP391AKF	3.610.000,00
Pengembalian Honor Pokja Gakkumdu Tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Mahulu	13/05/2024	80E2F3CIFK7B0ALS	4.512.500,00
Pengembalian Honor Pokja Tahun 2023 a.n Anson G. Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	13/05/2024	DA1097QLUP391AMU	950.000,00
Pengembalian Honor Pokja Tahun 2023 a.n. Sarwindah Bawaslu Kab Mahakam Ulu	13/05/2024	14DD42G4VPKUJBHO	1.900.000,00
Pengembalian Honor Pokja a.n. Sella Lestari Bawaslu kab. Mahakam Ulu	13/05/2024	DC9500NA04G5PBIB	1.900.000,00
Pengembalian Honor Pokja Tahun 2023 a.n. Stefi Bawaslu Kab. Mahakam Ulu	13/05/2024	E901A48VVEPNDBIF	1.900.000,00
Pengembalian Honor Pokja Tahun 2023 a.n. Wahyudin Bawaslu Kab. Mahakam Ulu	13/05/2024	9218B3CIFK7B0BJ0	1.900.000,00
Pengembalian Honor Pokja Gakkumdu Tahun 2023 Kabupaten Kutai Barat	13/05/2024	894E23CIFK7A1CV7	2.707.500,00

Pengembalian Honor Gakkumdu Tahun 2023 kabupaten Kutai Barat	13/05/2024	538BD7QLUP382DBR	4.930.000,00
Pengembalian Honor Pokja Gakkumdu Tahun 2023 Bawaslu Kota Balikpapan	13/05/2024	71CF755DF9C3QAE1	10.830.000,00
Pengembalian Honor Pokja Gakkumdu Tahun 2023 a.n. Nurul Hidayah Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	22/06/2024	10D692G4VPO7S2NK	1.805.000,00
Pengembalian Perjalanan Dinas ke Balikpapan tanggal 22 s.d. 23 Desember 2023 a.n. Wamustofa Hamzah	03/09/2024	555252G4VQ0JQHU3	296.000,00
Pengembalian Perjalanan Dinas ke Jakarta tanggal 19 s.d. 24 Desember 2023 a.n. Heddi Nopriwibowo	03/09/2024	2FF5F6U8EUSHRK5T	104.000,00
Pengembalian Perjalanan Dinas ke PPU tanggal 21 s.d. 22 Desember 2023 a.n. Hari Dermanto dan Zelot Aritonang	03/09/2024	4394555DF9NP3H63	1.420.500,00
Pengembalian Perjalanan Dinas ke Berau tanggal 23 s.d. 25 Desember 2023 a.n. Daini Rahmat	03/09/2024	657470NA04RR0KRK	134.000,00
Pengembalian Perjalanan Dinas ke Kutim tanggal 22 s.d. 24 Desember 2023 a.n. Josua Mikhael	03/09/2024	D33E93CIFKJ07MDT	438.700,00
Pengembalian Perjalanan Dinas ke Paser tanggal 27 s.d. 29 Desember 2023 a.n. Ratna Dewi	03/09/2024	4ED417QLUPEU8NM1	290.400,00
Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas tahun 2023 a.n. M. Teguh Adiguna Weynand dkk	03/09/2024	98AEF1JNFVE7EK64	190.400,00
Pengembalian Perjalanan Dinas tahun 2023 a.n. Galeh Akbar Tanjung dkk	03/09/2024	A9C830NA04RR1LSC	999.200,00
Pengembalian Perjalanan Dinas ke Mahulu tanggal 27 s.d. 30 Desember 2023 an. Ridho Wirawan	03/09/2024	53FBA61QV4A5FNHJ	50.000,00
Pengembalian Perjalanan Dinas ke Kutim tanggal 23 s.d. 25 Desember 2023 a.n. Ridho Wirawan	03/09/2024	A34CE3CIFKJ08OU1	120.000,00
Pengembalian Perjalanan Dinas ke Kutim tanggal 20 s.d. 22	03/09/2024	B15BE1JNFVE7EQ4Q	120.000,00

Desember 2023 a.n. Ridho Wirawan			
Pengembalian Perjalanan Dinas tahun 2023 a.n. Siti Khadijah dkk	03/09/2024	4C0A348VVF5CLPMF	6.276.640,00
Pengembalian an. Arrohman Nur dkk Perjalanan dinas Ke Jakarta tanggal 27 s/d 29 Desember 2023 dalam rangka Pengawasan Distribusi Logistik di Kota Jakarta Timur	23/12/2024	D406361QV4JM9AMV	22.711.186,00
Total			1.376.575.663,00

c. Pendapatan Perolehan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp136.555.563,00 dengan rincian sebagai berikut:

Penerima	Jenis Barang	Nama Barang	Nomor BAST	Tanggal BAST	Jumlah (Rp)
Bawaslu Kab. Paser	Laptop	Laptop Acer/AI14-51M-31Y7	B4522/KC-X/OPS/08/2024	05/08/2024	7.600.000,00
	Tablet PC	Apple Ipad 9 th	B4522/KC-X/OPS/08/2024	05/08/2024	7.400.000,00
	Kursi Roda	Kursi Roda Merk GEA Tipe FS871	B5120/KC-X/OPS/09/2024	31/12/2024	1.400.000,00
Bawaslu Kab. Kutai Barat	Laptop	Asus Setara Core I5 RAM 8GB SSD 512GB	B.104/BO/LYI/12/2024	31/05/2024	35.000.000,00
Bawaslu Kab. PPU	Tablet PC	Xiaomi REDMI PD PRO 8/256GB	R09.Br.Bm.PP U/00149/2024	02/10/2024	16.500.000,00
	Handphone	Samsung Galaxy A06 4/128GB		02/10/2024	1.500.000,00
Bawaslu Kab. Berau	Air Conditioner	Panasonic YN 12 WKJ	B.1256.BO/RO /BJM/MFD/10/2024	02/10/2024	6.300.000,00
	Air Cooler	Sharp PJA 36 TY		02/10/2024	1.250.000,00
	Kulkas	Sharp SJN 182 NHS		02/10/2024	6.150.000,00
	Kipas Angin	Maspion PW 456		02/10/2024	1.300.000,00
Bawaslu Kota Balikpapan	Laptop	Infinix Laptop Inbook X2 I3 1115G4-8GB-256GB-Win11	R09.Br.BKJ/341/2024	13/11/2024	26.625.000,00
	Kursi Sofa	Sofa L Melati Grey + Meja Kaca		13/11/2024	6.800.000,00

	Kursi Roda	Crown Ecosteel Manual Wheelchair (KY809)		13/11/2024	1.380.563,00
Bawaslu Kab. Kutai Kartanegara	Air Conditioner	Sharp 2,5 PK Type CS-J28FFP6	B.7104/KC-X/OPS/08/2024	09/08/2024	13.499.000,00
	Kulkas	Sharp Kirei III		09/08/2024	1.699.000,00
	Kulkas	Sanken SKG 196HB 190lt		09/08/2024	2.152.000,00
	Total				136.555.563,00

Pos Luar Biasa

Rp0,00

D.11 Pos Luar Biasa

Rincian Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa untuk per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Defisit LO

(Rp275.354.343.532,00)

D.12 SURPLUS (DEFISIT) LO

Defisit LO per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp275.354.343.532,00) dan Rp125.958.991.566,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp128.508.324.322,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 masing-masing sebesar Rp128.508.324.322,00 dan Rp3.313.659.584,00.

Defisit LO

Rp275.354.343.532,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp275.354.343.532,00 dan Rp125.958.991.566,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi yang

Menambah /

Mengurangi Ekuitas

Rp13.350.000,00

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp13.350.000,00 dan Rp9.786.894,00.

E.3.1 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp13.450.000,00 dan Rp7.786.894,00. Koreksi nilai aset non revaluasi terdiri atas koreksi pencatatan nilai bertambah dan koreksi pencatatan nilai berkurang dengan rincian sebagai berikut:

a) Koreksi pencatatan nilai bertambah merupakan tindak lanjut atas konsep temuan Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Bawaslu Tahun Anggaran 2024, terdapat belanja software yang belum dikapitalisasi pada aplikasi SAKTI sehingga perlu dilakukan koreksi nilai bertambah terhadap aset dengan rincian sebagai berikut:

Kode Barang	Jenis BMN	Jumlah	Nilai (Rp)
3.06.02.01.999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	9	12.105.000,00

3.10.01.02.009	Tablet PC	1	1.345.000,00
Total			13.450.000,00

b) Koreksi pencatatan nilai berkurang merupakan tindak lanjut atas konsep temuan Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Bawaslu Tahun Anggaran 2024, sehingga dilakukan koreksi terhadap perangkat PPID dengan rincian sebagai berikut:

Kode Barang	Jenis BMN	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)
3.06.02.01.999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	9	90.000,00
3.10.01.02.009	Tablet PC	1	10.000,00

E.3.2 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.000.000,00.

*Transaksi Antar Entitas
Rp253.813.651.258,00*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp253.813.651.258,00 dan Rp251.163.443.198,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai (Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	115.692.144.078,00
Diterima dari Entitas Lain	(1.423.479.636,00)
Transfer Masuk	111.911.000,00
Pengesahan Hibah Langsung	134.433.075.816,00
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	0,00
Jumlah	253.813.651.258,00

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp1.423.479.636,00 sedangkan DKEL sebesar Rp115.692.144.078,00.

DDEL sebesar Rp1.423.479.636,00 ini terdiri dari:

Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain	Jumlah (Rp)
Pendapatan Jasa Giro	2.275.566,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	39.628.407,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	1.376.575.663,00
Total	1.423.479.636,00

a. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp2.275.566,00 merupakan pendapatan jasa giro Rekening Dana Pemilu dan Rekening Dana Hibah Bawaslu Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Jumlah (Rp)
Setor Jasa Giro Rekening Panwascam se-Kota Balikpapan	29/02/2024	6B39E7QLUOQQBVBE	1.062,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kubar Tahun 2024	23/04/2024	02FB01JNFUVS5P3L	414.529,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Paser Tahun 2024	23/04/2024	2F7AC61QV3RQ6P5A	12.058,00

Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kubar Tahun 2023	23/04/2024	FBFAD0NA04DFOP0N	174.416,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sepaku - PPU tahun 2023	25/04/2024	48FF355DF99G0ETP	22.253,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sepaku - PPU tahun 2024	25/04/2024	B7FC348VVEN3JERF	25.249,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kutim Tahun 2024	25/04/2024	DB1333CIFK4N6E42	469.711,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan Penajam - PPU Tahun 2024	29/04/2024	0086855DF99L5IAG	70.156,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan Waru - PPU Tahun 2024	29/04/2024	5DF9B0NA04DN4KL0	28.687,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan Babulu - PPU Tahun 2024	29/04/2024	909B00NA04DN4KSL	44.550,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Paser Tahun 2024	30/04/2024	DBA8A6U8EUEE7IO3	22.783,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024	30/04/2024	11E4361QV3S1Q9GE	645.346,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kutai Barat	30/04/2024	BF3BF61QV3S1Q9QB	45.243,00
Setor Jasa Giro Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kukar Tahun 2024	30/04/2024	5E23A6U8EUEE783O	197.612,00
Setor Jasa Giro atas RDP Bawaslu Kabupaten Kutai Timur bulan Februari s.d. Maret 2023	18/09/2024	D82B66U8EUT05SM9	76.850,00
Setor Jasa Giro Ad- Hoc se-Kota Balikpapan bulan Juli s.d. Desember 2024	31/12/2024	E8A823CIFKSOJA4G	25.061,00
Total			2.257.566,00

b. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.000.000,00 merupakan pendapatan dari pemindahtanganan melalui penjualan (lelang) atas BMN sejumlah 501 unit sesuai Surat Persetujuan Pemindahtanganan nomor 6961.1/PL.08/K1/07/2024. Atas lelang tersebut telah terbit risalah lelang nomor 700/13.02/2024-01;

c. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp39.628.407,00 terdiri dari:

Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Jumlah (Rp)
Pengembalian Tunjangan Fungsional a.n. Lely Febriyanti	23/01/2024	D7AC16U8EU52S72P	12.100.000,00
Pengembalian Tukin a.n. Lely Febriyanti	23/01/2024	08C9C48VVEDTL7GO	22.954.998,00
Pengembalian Uang Makan a.n. Lely Febriyanti	23/01/2024	9B5238N3EJ9RM995	3.304.100,00
Kelebihan Pembayaran Uang makan PNS Desember 2023	30/01/2024	CB85A1JNFUN5N3R5	192.400,00
Kelebihan Pembayaran Uang Lembur PNS Desember 2023	30/01/2024	82C4D61QV3J3O4H6	257.750,00
Pengembalian Tukin PNS Kab/Kota Desember 2023 a.n. Jainal Abidinsyah, dkk.	18/12/2024	865371JNFVNIMLUC	308.298,00
Pengembalian Tukin PPPK Kab/Kota Desember 2023 a.n. Firanty Maulidani Anshori	18/12/2024	BDF1A7QLUPO9HML5	43.905,00
Pengembalian Tukin PNS Provinsi Desember 2023 a.n. Ahmad Jeri, dkk.	18/12/2024	6D5BF7QLUPO9HL3A	466.956,00
Total			39.628.407,00

d. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp1.376.575.663,00 terdiri dari:

Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Jumlah (Rp)
Pengembalian Belanja Perdin LS sebelum milik Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Paser	05/01/2024	31C2D6U8EU4ORRIL	256.900.000,00
Pengembalian Belanja Perdin LS sebelum milik Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Paser	05/01/2024	4B2C83CIFJR77SQR	6.520.000,00

Pengembalian Belanja Perdin LS sebelum milik Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Paser	05/01/2024	6AC2261QV3ICEQ7G	1.650.000,00
Pengembalian Perjalanan Dinas Publikasi Kampanye	22/01/2024	9D6618N3EJ9SQ737	1.200.000,00
Pengembalian Perjalanan Dinas Logistik Luar Daerah	22/01/2024	087B161QV3INJ6JG	3.137.118,00
Pengembalian Perjalanan Dinas Pengawasan Kampanye	22/01/2024	A7D260NA044D56HE	18.300.000,00
Pengembalian Perjalanan Dinas Faskor Bawaslu RI	22/01/2024	25DEF0NA044D5AOE	6.884.473,00
Perjalanan Dinas Pengawasan Logistik Dalam Kota	22/01/2024	0A1723CIFJRIC45T	1.500.000,00
Pengembalian Perjalanan Dinas Publikasi Logistik	22/01/2024	4ED6E2G4VP960KBE	600.000,00
Pengembalian Perjalanan Dinas Faskor Bawaslu Provinsi	22/01/2024	90D9761QV3INJBPO	30.630.738,00
Pengembalian Perjalanan Dinas Faskor	22/01/2024	4F2B03CIFJRICBAV	16.536.767,00
Pengembalian Perjalanan Dinas Perdin Gakummdu Tahapan Kampanye	22/01/2024	B8C4648VVEDUP8G2	101.500,00
Pengembalian Perjalanan Dinas Undangan Terkait Kampanye	22/01/2024	B42AD0NA044D5A0C	4.699.500,00
Pengembalian Kompensasi 30% perjalanan dalam rangka supervisi terkait pemetaan potensi rawan calon TMS menjelang penetapan DCT Anggota DPRD tingkat Kab/kota	30/01/2024	5017E3CIFJRUAURO	536.700,00
Pengembalian 30% perjalanan dinas ke Balikpapan dalam rangka menghadiri undangan Bawaslu RI kegiatan Rapat kerja teknis penguatan kelembagaan Bawaslu di Bidang hukum sebagai pemberi keterangan di MK	30/01/2024	985BB61QV3J3I1CT	236.700,00
Pengembalian Uang Harian ke Balikpapan menghadiri undangan Bawaslu RI pada kegiatan Rapat Koordinasi nasional Netralitas TNI Polri ASN Pemilu tanggal 26 s.d. 29 Oktober 2023 a.n. Daini Rahmat	30/01/2024	62A961JNFUN5H2P8	60.000,00

Pengembalian Uang harian dan kompensasi 30% Supervisi/monitoring kesiapan personel Sentra penegakan Hukum terpadu (Gakkumdu) tahapan kampanye di Bawaslu Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu	30/01/2024	9E2BC3CIFJRUB37B	1.702.500,00
Pengembalian Transport perjalanan dinas ke Bekasi dalam rangka menghadiri undangan Bawaslu RI kegiatan Konsolidasi penyusunan laporan keuangan Bawalu Triwulan III tanggal 15 s.d 18 Oktober 2023 a.n. Dyah Ayu	30/01/2024	68AE31JNFUN5H4P1	193.000,00
Pengembalian TUP Bulan Desember Perjalanan Dinas Faskor Ke Provinsi	30/01/2024	048BA55DF90K2S8H	218.000,00
Pengembalian TUP Bulan Desember Perjalanan Dinas Faskor ke Provinsi	30/01/2024	BCDC92G4VP9ERTQ E	150.000,00
Pengembalian TUP Bulan Desember 2023 Perjalanan Dinas Faskor Bawaslu RI	30/01/2024	25A0A8N3EJA5MULR	200.000,00
Pengembalian TUP Bulan Deseember 2023 Belanja Perjalanan dinas biasa dalam rangka Pengawasan Logistik	30/01/2024	E62297QLUONPA17C	676.457,00
Pengembalian TUP Bulan Deseember 2023 Perjalanan dinas dalam kota Pengawasan Kampanye	30/01/2024	DA35A3CIFJRR92BP	4.540.000,00
Pengembalian TUP Bulan Deseember 2023 Belanja Perjalanan dinas Faskor Bawaslu Provinsi	30/01/2024	242E661QV3J0G0QG	8.355.818,00
Pengembalian Perjalanan Dinas Publikasi dan Dolkumentasi Pengawasan Logistik (Kecamatan) Kabupaten Berau	10/02/2024	35F746U8EU7SMOUQ	25.850.000,00
Pengembalian Perjalanan Dinas Publikasi dan Dokumentasi Pengawasan Masa Kampanye (Kecamatan) Kabupaten Berau	10/02/2024	EEBE72G4VPBULO57	92.910.000,00
Pengembalian Pelayanan Operasional Perkantoran	10/02/2024	6DCCF1JNFUPI8ORD	1.512.000,00

(Kecamatan) Kabupaten Berau			
Pengembalian Perjalanan Dinas Fasilitas, Koordinasi, dan Pelaporan (Kecamatan) Kabupaten Berau	10/02/2024	48C206U8EU7SMOCC	52.410.000,00
Pengembalian RDP Perjalanan Dinas Dalam Verifikasi Faktual	29/02/2024	693C52G4VPCFU1EQ	900.000,00
Pengembalian RDP Langganan Air	29/02/2024	AEC351JNFUQ3GUTJ	5.771,00
Pengembalian RDP Internet	29/02/2024	444AC1JNFUQ3GVSQ	313.800,00
Pengembalian RDP Rapat Publikasi Kampanye	29/02/2024	80E6355DF93L4UM1	4.760.000,00
Pengembalian RDP Perjalanan Dinas dalam Kota	29/02/2024	F8B0661QV3M1I0P1	10.580.000,00
Pengembalian RDP Perjalanan Dinas Kampanye	29/02/2024	0E6F00NA047N3TCS	26.150.000,00
Pengembalian RDP Rapat Biasa	29/02/2024	750133CIFJUSAUQL	240.000,00
Pengembalian RDP Perjalanan Dinas Logistik	29/02/2024	D85E07QLUOQQC134	2.400.000,00
Pengembalian ke 2 Dana TUP Tahun 2023 Bawaslu Kab Kubar	17/04/2024	9D0D27QLUP0EJ0TE	41.473.895,00
Pengembalian LS Ad Hoc Tahun 2023	23/04/2024	8429955DF99DPPSM	51.457.000,00
Pengembalian LS Ad Hoc Tahun 2023	23/04/2024	7EA883CIFK4KVPU4	250.000,00
Pengembalian LS Ad Hoc Tahun 2023	23/04/2024	5A6B82G4VPI8IQHD	832.000,00
Pengembalian LS Ad Hoc Tahun 2023	23/04/2024	7C18A1JNFUVS5Q58	8.360.000,00
Pengembalian LS Ad Hoc Tahun 2023	23/04/2024	4D04C1JNFUVS5Q3K	40.280.000,00
Pengembalian LS Ad Hoc Tahun 2023	23/04/2024	F6EB355DF99DPQ20	9.650.000,00
Pengembalian LS Ad Hoc Tahun 2023	23/04/2024	995A348VVEN1CQ11	210.000,00
Pengembalian LS Ad Hoc Tahun 2023	23/04/2024	129B67QLUP0J0QNP	532.880.000,00
Pengembalian Pokja Gakkumdu Tahun 2023 Kabupaten Kutai Kartanegara	07/05/2024	374F56U8EUGODCEG	6.460.000,00
Pengembalian Pokja Gakkumdu Tahun 2023 Kabupaten Kutai Kartanegara	07/05/2024	C8A3555DF9BVJBDM	21.660.000,00
Pengembalian Transport Perjadi dalam rangka menghadiri Konsolidasi Nasional di Jakarta tgl 24 s.d. 29 Nov 2023 a.n. Daini Rahmat	08/05/2024	0911261QV3UD31KV	279.500,00

Pengembalian Tiket Perjadin dalam rangka menghadiri Undangan Bawaslu RI di Jakarta Tanggal 12 sd 14 Desember 2023 a.n. Yusuf	08/05/2024	6C94948VVEPK9055	2.194.420,00
Pengembalian Transport Perjadin dalam Rangka menghadiri undangan RI ke Manado Pada tgl 28 s.d. 1 Des 2023 a.n. Yusuf	08/05/2024	4C5D63CIFK77RVM0	164.480,00
Pengembalian BBM dalam rangka Memfasilitasi staf Bawaslu RI Ke Bandara APT Pranoto tgl 20 Okt 2023 a.n M. Azizu Malik Effendi	08/05/2024	2664D55DF9C0LQKE	250.000,00
Pengembalian Transport Perjadin dalam Rangka pengawasan Logistik Pemilu TA. 2024 di Pasuruan tgl 3 s.d. 6 Des 2023 a.n. Wamustofa Hamzah	08/05/2024	C84CC55DF9C0LSEE	200.000,00
Pengembalian Honor Pokja Gakkumdu Tahun 2023 Kabupaten Kutai Timur	13/05/2024	5E7291JNFV2E18OC	5.415.000,00
Pengembalian Honor Pokja Gakkumdu Tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Mahulu	13/05/2024	DB82C0NA04G5PAK1	902.500,00
Pengembalian Honor Pokja Gakkumdu Tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Mahulu	13/05/2024	0D9B97QLUP391AKF	3.610.000,00
Pengembalian Honor Pokja Gakkumdu Tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Mahulu	13/05/2024	80E2F3CIFK7B0ALS	4.512.500,00
Pengembalian Honor Pokja Tahun 2023 a.n Anson G. Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	13/05/2024	DA1097QLUP391AMU	950.000,00
Pengembalian Honor Pokja Tahun 2023 a.n. Sarwindah Bawaslu Kab Mahakam Ulu	13/05/2024	14DD42G4VPKUJBHO	1.900.000,00
Pengembalian Honor Pokja a.n. Sella Lestari Bawaslu kab. Mahakam Ulu	13/05/2024	DC9500NA04G5PBIB	1.900.000,00
Pengembalian Honor Pokja Tahun 2023 a.n. Stefi Bawaslu Kab. Mahakam Ulu	13/05/2024	E901A48VVEPNDBIF	1.900.000,00
Pengembalian Honor Pokja Tahun 2023 a.n. Wahyudin Bawaslu Kab. Mahakam Ulu	13/05/2024	9218B3CIFK7B0BJ0	1.900.000,00

Pengembalian Honor Pokja Gakkumdu Tahun 2023 Kabupaten Kutai Barat	13/05/2024	894E23CIFK7A1CV7	2.707.500,00
Pengembalian Honor Gakkumdu Tahun 2023 kabupaten Kutai Barat	13/05/2024	538BD7QLUP382DBR	4.930.000,00
Pengembalian Honor Pokja Gakkumdu Tahun 2023 Bawaslu Kota Balikpapan	13/05/2024	71CF755DF9C3QAE1	10.830.000,00
Pengembalian Honor Pokja Gakkumdu Tahun 2023 a.n. Nurul Hidayah Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	22/06/2024	10D692G4VPO7S2NK	1.805.000,00
Pengembalian Perjalanan Dinas ke Balikpapan tanggal 22 s.d. 23 Desember 2023 a.n. Wamustofa Hamzah	03/09/2024	555252G4VQ0JQHU3	296.000,00
Pengembalian Perjalanan Dinas ke Jakarta tanggal 19 s.d. 24 Desember 2023 a.n. Heddi Nopriwibowo	03/09/2024	2FF5F6U8EUSHRK5T	104.000,00
Pengembalian Perjalanan Dinas ke PPU tanggal 21 s.d. 22 Desember 2023 a.n. Hari Dermanto dan Zelot Aritonang	03/09/2024	4394555DF9NP3H63	1.420.500,00
Pengembalian Perjalanan Dinas ke Berau tanggal 23 s.d. 25 Desember 2023 a.n. Daini Rahmat	03/09/2024	657470NA04RR0KRK	134.000,00
Pengembalian Perjalanan Dinas ke Kutim tanggal 22 s.d. 24 Desember 2023 a.n. Josua Mikhael	03/09/2024	D33E93CIFKJ07MDT	438.700,00
Pengembalian Perjalanan Dinas ke Paser tanggal 27 s.d. 29 Desember 2023 a.n. Ratna Dewi	03/09/2024	4ED417QLUPEU8NM1	290.400,00
Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas tahun 2023 a.n. M. Teguh Adiguna Weynand dkk	03/09/2024	98AEF1JNFVE7EK64	190.400,00
Pengembalian Perjalanan Dinas tahun 2023 a.n. Galeh Akbar Tanjung dkk	03/09/2024	A9C830NA04RR1LSC	999.200,00
Pengembalian Perjalanan Dinas ke Mahulu tanggal 27 s.d. 30 Desember 2023 an. Ridho Wirawan	03/09/2024	53FBA61QV4A5FNHJ	50.000,00
Pengembalian Perjalanan Dinas ke Kutim tanggal 23 s.d. 25	03/09/2024	A34CE3CIFKJ08OU1	120.000,00

Desember 2023 a.n. Ridho Wirawan			
Pengembalian Perjalanan Dinas ke Kutim tanggal 20 s.d. 22 Desember 2023 a.n. Ridho Wirawan	03/09/2024	B15BE1JNFVE7EQ4Q	120.000,00
Pengembalian Perjalanan Dinas tahun 2023 a.n. Siti Khadijah, dkk.	03/09/2024	4C0A348VVF5CLPMF	6.276.640,00
Pengembalian an. Arrohman Nur, dkk. Perjalanan dinas ke Jakarta tanggal 27 s.d. 29 Desember 2023 dalam rangka Pengawasan Distribusi Logistik di Kota Jakarta Timur	23/12/2024	D406361QV4JM9AMV	22.711.186,00
Total			1.376.575.663,00

DKEL sebesar Rp115.692.144.078,00 merupakan belanja netto yang berasal dari anggaran rupiah murni, terdiri dari:

Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain

Uraian	Nilai (Rp)
Belanja Pegawai	12.162.684.662,00
Belanja Barang	99.326.169.416,00
Belanja Modal	4.203.290.000,00
Jumlah	115.692.144.078,00

E.5 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/penurunan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp21.527.342.274,00) dan Rp128.508.324.322,00.

*Penurunan
Ekuitas
(Rp21.527.342.274,00)*

Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
Surplus/Defisit LO	(275.354.343.532,00)	(125.958.991.566,00)
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	13.350.000,00	(9.786.894)
Penyesuaian Nilai Aset	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	13.350.000,00	(7.786.894)

Koreksi Lain-Lain	0,00	(2.000.000)
Transaksi Antar Entitas	253.813.651.258,00	251.163.443.198
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	(21.527.342.274,00)	125.194.664.738,00

Ekuitas Akhir

E.6 Ekuitas Akhir

Rp106.980.982.048,00

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp106.980.982.048,00 dan Rp128.508.324.322,00.

Nilai ekuitas akhir merupakan akumulasi nilai ekuitas awal sebesar Rp128.508.324.322,00 dikurangi penurunan ekuitas sebesar (Rp21.527.342.274,00)

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bawaslu. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur termasuk dalam Provinsi Kelas B yang terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur termasuk dalam Provinsi Kelompok Kelas B yang terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. Bagian Administrasi;
- b. Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat; dan
- c. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum.

F.2 Pejabat Perbendaharaan

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 2 Januari 2020 telah ditunjuk Pejabat Pengelola Satuan Kerja dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Yusuf, S.Si., M.A.

Sepanjang tahun 2024, telah terdapat beberapa pergantian pejabat perbendaharaan dengan rincian sebagai berikut:

No	Jabatan	Semula	Menjadi	Nomor SK	Tanggal SK
1.	Pejabat Pembuat Komitmen Dana Hibah Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	-	Tyagita Osa Ayuningtyas, S.S.T.	3/KU.01.00/KI/01/2024	02 Januari 2024
2.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Nurhana Sikky, S.E.	Tito Dwi Hidayat, S.Si.	105/KP.04/KI/02/2024	15 Februari 2024
3.	Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu	Ahmad Firdaus, S.TP., M.E.	Nurhana Sikky, S.E.	371/KU.01.00/KI/IV/2024	29 April 2024

	Kabupaten Kutai Timur				
4.	Pejabat Pembuat Komitmen II Dana Hibah Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	-	Athanasius Andri Purwanta, S.Sos.	593/KU.01.00/KI/06/2024	27 Juni 2024
5.	Pejabat Pembuat Komitmen II Dana Hibah Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	-	Andi Tinah Herlina, S.Sos.	625/KU.01.00/KI/07/2024	03 Juli 2024

F.3 Rekening yang Dikelola

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengelola rekening yang berasal dari 2 (dua) sumber anggaran, yaitu Rupiah Murni (RM) dan Hibah Dalam Negeri (HDN).

Rekening yang masih aktif dikelola per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Bank	Nama Rekening	Nomor Rekening
RM Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Mandiri	BPG 046 BAWASLU PROV KALTIM	810012684171000
RM Bawaslu Kabupaten Berau	Mandiri	BPP 046 BAWASLU KAB BERAU	810012684171002
RM Bawaslu Kabupaten Bontang	Mandiri	BPP 046 BAWASLU KT BONTANG	8100126864171003
RM Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	Mandiri	BPP 046 BAWASLU KB KUBAR	8100126864171004
RM Bawaslu Kutai Kartanegara	Mandiri	BPP 046 BAWASLU KB KUKAR	8100126664171005
RM Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Mandiri	BPP 046 BAWASLU KB KUTIM	8100126864171006
RM Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	Mandiri	BP 046 BAWASLU KB MAHULU	8100126864171007
RM Bawaslu Kabupaten Paser	Mandiri	BPP 046 BAWASLU KB PASER	8100126864171008
RM Bawaslu Kota Balikpapan	Mandiri	BPP 046 BAWASLU KT BALIKPAPAN	8100126864171001

RM Bawaslu Kota Penajam Paser Utara	Mandiri	BPP 046 BAWASLU KB PPU	8100126864171009
Rekening Hibah Pemilihan Gubernur Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	BRI	RPL046 PDHL PIGUB KTM 2KEPZDTA	654286864172401
Rekening Hibah Pemilihan Gubernur Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	BRI	RPL046 PDH PIGUB KTM 2KEPZDTA	654266864172501
Rekening Hibah Pemilihan Gubernur Bawaslu Kota Balikpapan	BRI	RPL046 PDH PIGUB BLP 2KEPZDTA	654266864172502
Rekening Hibah Pemilihan Gubernur Bawaslu Kota Bontang	BRI	RPL046 PDH PIGUB BOTG 2KEPZDTA	654266864172503
Rekening Hibah Pemilihan Gubernur Bawaslu Kabupaten Berau	BRI	RPL046 PDH PIGUB BRAU 2KEPZDTA	654266864172504
Rekening Hibah Pemilihan Gubernur Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	BRI	RPL046 PDH PIGUB KUTB 2KEPZDTA	654266864172505
Rekening Hibah Pemilihan Gubernur Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	BRI	RPL046 PDH PIGUB KUTK 2KEPZDTA	654266864172506
Rekening Hibah Pemilihan Gubernur Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	BRI	RPL046 PDH PIGUB KUTI 2KEPZDTA	654266864172507
Rekening Hibah Pemilihan Gubernur Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	BRI	RPL046 PDH PIGUB MHUL 2KEPZDTA	654266864172508
Rekening Hibah Pemilihan Gubernur Bawaslu Kabupaten Paser	BRI	RPL046 PDH PIGUB PASR 2KEPZDTA	654266864172509
Rekening Hibah Pemilihan Gubernur Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara	BRI	RPL046 PDH PIGUB PPUT 2KEPZDTA	654266864172510
Rekening Hibah Pemilihan Wali Kota Bawaslu Kota Bontang	BRI	RPL046 PDHL PIKOT BTG 23K7C6GA	654256864172402

Rekening Hibah Pemilihan Bupati Bawaslu Kabupaten Berau	BRI	RPL046 PDHL PIBUP BRU 231LJM4A	654256864172403
Rekening Hibah Pemilihan Bupati Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	BRI	RPL046 PDHL PIBUP KUB 2SV6BV2A	654256864172404
Rekening Hibah Pemilihan Bupati Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	BRI	RPL046 PDHL PIBUP KKN 2Z7NGNZA	654256864172405
Rekening Hibah Pemilihan Bupati Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	BRI	RPL046 PDHL PIBUP KTM 2N8G14XA	654256864172406
Rekening Hibah Pemilihan Bupati Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	BRI	RPL046 PDHL PIBUP MHU 282ATB3A	654256864172407
Rekening Hibah Pemilihan Bupati Bawaslu Kabupaten Paser	BRI	RPL046 PDHL PIBUP PSR 2DWMMBEA	654256864172408
Rekening Hibah Pemilihan Wali Kota Bawaslu Kota Balikpapan	Mandiri	RPL046 PDHL PILKOT BLKPPN 2G8EM8KA	8100126864172401
Rekening Hibah Pemilihan Bupati Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara	Mandiri	RPL046 PDHL PILBUP PEPASUT 2E9YCRQA	810012684172402
Rekening Hibah Pemilihan Wali Kota Bawaslu Kota Bontang	BRI	RPL046 PDH PIKOT BTG 23K7C6GA	654266864172512
Rekening Hibah Pemilihan Bupati Bawaslu Kabupaten Berau	BRI	PL046 PDH PIBUP BRU 231LJM4A	654266864172513
Rekening Hibah Pemilihan Bupati Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	BRI	RPL046 PDH PIBUP KUB 2SV6BV2A	654266864172514
Rekening Hibah Pemilihan Bupati Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	BRI	RPL046 PDH PIBUP KKN 2Z7NGNZA	654266864172515
Rekening Hibah Pemilihan Bupati Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	BRI	RPL046 PDH PIBUP KTM 2N8G14XA	654266864172516

Rekening Hibah Pemilihan Bupati Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	BRI	RPL046 PDH PIBUP MHU 282ATB3A	654266864172517
Rekening Hibah Pemilihan Bupati Bawaslu Kabupaten Paser	BRI	RPL046 PDH PIBUP PSR 2DWMMBEA	654266864172518
Rekening Hibah Pemilihan Wali Kota Bawaslu Kota Balikpapan	Mandiri	RPL046 PDH PILKOT BLKPPN 2G8EM8KA	8100126864172501
Rekening Hibah Pemilihan Bupati Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara	Mandiri	RPL046 PDH PILBUP PEPASUT 2E9YCRQA	8100126864172502

F.4 Pengungkapan Laporan Kinerja dan Program Prioritas Nasional (PN)

1. Laporan Kinerja Satuan Kerja

Kode	Kegiatan	Belanja							
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CQ.5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	184.728.135.000,00	162.606.605.023,00	88,02					
CQ.5245.BAH.001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	158.500.000,00	101.267.293,00	63,89	20	20	Layanan	100,00	
CQ.5245.BDB.001	Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	89.576.000,00	88.279.100,00	98,55	1	1	Lembaga	100,00	
CQ.5245.BIC.002	Pengawasan Pilkada Serentak - Provinsi	78.352.256.000,00	68.164.430.676,00	87,00	1	1	Laporan	100,00	
CQ.5245.BIC.003	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 01	14.377.811.000,00	13.094.680.911,00	91,08	1	1	Laporan	100,00	

Kode	Kegiatan	Belanja							
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CQ.5245.BIC.004	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 02	11.814.224.000,00	11.397.969.431,00	96,48	1	1	Laporan	100,00	
CQ.5245.BIC.005	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 03	6.578.002.000,00	5.281.625.890,00	79,33	1	1	Laporan	100,00	
CQ.5245.BIC.006	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 04	17.459.434.000,00	15.481.193.093,00	88,67	1	1	Laporan	100,00	
CQ.5245.BIC.007	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 05	14.975.138.000,00	13.653.636.803,00	91,18	1	1	Laporan	100,00	
CQ.5245.BIC.008	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 06	15.138.012.000,00	13.226.585.000,00	87,37	1	1	Laporan	100,00	
CQ.5245.BIC.009	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 07	7.899.164.000,00	7.278.007.802,00	92,14	1	1	Laporan	100,00	
CQ.5245.BIC.010	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 08	8.632.618.000,00	7.757.449.090,00	89,86	1	1	Laporan	100,00	
CQ.5245.BIC.011	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 09	8.210.869.000,00	6.818.064.491,00	83,04	1	1	Laporan	100,00	
CQ.5245.BKC.001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1.042.531.000,00	326.4115.443,00	31,31	51	51	Laporan	100,00	
CQ.6661.QIC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	42.436.588.000,00	26.295.807.254,00	61,96	270	270	Lembaga	100,00	

Kode	Kegiatan	Belanja							
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CQ.6661.QIC.003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc	3.545.291.000,00	3.435.436.180,00	96,90	8.878	8.878	Laporan	100,00	
CQ.6661.UAB.001	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu	246.000.000,00	224.870.000,00	91,41	16	16	Sistem Informasi	100,00	
CQ.6838	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	32.666.186.000,00	31.748.357.554,00	97,19					
CQ.6838.QIC.001	Honorarium Pengawas Ad-Hoc	19.900.232.000,00	19.718.094.000,00	99,08	9.952	9.952	Lembaga	100,00	
CQ.6838.QIC.002	Operasional Pengawas Ad-Hoc	12.765.954.000,00	12.030.263.554,00	94,24	229	229	Lembaga	100,00	
CQ.6843	Pengawasan Masa Kampanye Pemilu	5.879.403.000,00	4.787.635.616,00	81,43					
CQ.6843.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye	150.690.000,00	97.807.400,00	64,91	8	8	Perkara	100,00	
CQ.6843.QIC.001	Pengawasan Masa Kampanye	5.728.713.000,00	4.689.828.216,00	81,87	1.191	1.191	Laporan	100,00	
CQ.6844	Pengawasan Masa Tenang	1.956.474.000,00	1.539.208.400,00	78,67					
CQ.6844.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Tenang	103.796.000,00	28.541.600.000,00	27,50	8	8	Perkara	100,00	
CQ.6844.QIC.001	Pengawasan Masa Tenang	1.852.678.000,00	1.510.666.800,00	81,54	1.199	1.199	Laporan	100,00	
CQ.6845	Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara	13.327.699.000,00	12.402.948.107,00	93,06					
CQ.6845.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara	81.690.000,00	16.445.000,00	20,13	6	6	Perkara	100,00	
CQ.6845.QIC.001	Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara	13.246.009.000,00	12.386.503.107,00	93,51	10.172	10.172	Laporan	100,00	
CQ.6846	Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu	1.285.175.000,00	504.370.465,00	39,25					
CQ.6846.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Penetapan Hasil Pemilu	63.010.000,00	13.652.500,00	21,67	4	4	Perkara	100,00	
CQ.6846.QIC.001	Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu	1.222.165.000,00	490.717.965,00	40,15	49	49	Laporan	100,00	
CQ.6847	Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden Dan Wakil Presiden Serta	119.400.000,00	19.942.100,00	16,70					

Kode	Kegiatan	Belanja							
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota								
CQ.6847.QIC.001	Publikasi Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	56.090.000,00	19.942.100,00	35,55	10	10	Laporan	100,00	
CQ.6847.QIC.002	Pengawasan Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	63.010.000,00	0,00	0,00	10	10	Laporan	100,00	
CQ.6848	Pengawasan Logistik	5.248.958.000,00	4.718.243.611,00	89,89					
CQ.6848.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Logistik	28.420.000,00	1.200.000,00	4,22	4	4	Perkara	100,00	
CQ.6848.QIC.001	Pengawasan Logistik	5.220.538.000,00	4.717.043.611,00	90,36	10.077	10.077	Laporan	100,00	
WA.4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	33.358.680.000,00	29.499.362.955,00	88,43					
WA.4355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	32.020.000,00	0,00	0,00	10	10	Dokumen	100,00	
WA.4356	Pengelolaan Data dan Informasi	178.412.000,00	94.041.000,00	52,71					
WA.4356.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu	154.010.000,00	90.272.000,00	58,61	10	10	Laporan	100,00	
WA.4356.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	24.402.000,00	3.769.000,00	15,45	10	10	Laporan	100,00	
WA.6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	32.625.655.000,00	29.224.288.455,00	89,57					
WA.6849.EBA.956	Layanan BMN	91.920.000,00	62.378.400,00	67,86	10	10	Layanan	100,00	
WA.6849.EBA.956	Layanan Perkantoran	25.777.319.000,00	24.840.590.805,00	90,08	2	2	Layanan	100,00	
WA.6849.EBB.951	Layanan Sarana Internal	4.338.262.000,00	4.005.420.000,00	92,33	141	141	Unit	100,00	
WA.6849.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	166.912.000,00	98.153.650,00	58,81	10	10	Dokumen	100,00	
WA.6849.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	81.190.000,00	37.182.200,00	45,80	10	10	Dokumen	100,00	
WA.6849.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	290.692.000,00	179.083.400,00	61,61	10	10	Dokumen	100,00	
WA.6849.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	79.360.000,00	1.480.000,00	1,86	10	10	Dokumen	100,00	

Kode	Kegiatan	Belanja							
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WA.6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	522.593.000,00	181.033.500,00	34,64					
WA.6850.EBA.957	Layanan Hukum	76.870.000,00	17.465.000,00	22,72	21	21	Laporan	100,00	
WA.6850.EBA.962	Layanan Umum	191.100.000,00	93.668.000,00	49,02	10	10	Dokumen	100,00	
WA.6850.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	100.108.000,00	825.000,00	0,82	11	11	Laporan	100,00	
WA.6850.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	154.515.000,00	69.075.500,00	44,70	196	196	Orang	100,00	
Total		324.797.989.000,00	277.782.787.265,00	85,52					

2. Pengungkapan Prioritas Nasional (PN)

Prioritas Nasional VII--Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Pelaksanaannya antara lain melalui satu program prioritas, delapan kegiatan prioritas yang tersebar di satu satuan kerja dengan pagu mencapai Rp106.711.174.000,00 dan realisasi sebesar Rp85.676.819.287,00 dengan rincian sebagai berikut:

Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
6661.Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	46.227.879.000,00	29.956.113.434,00	64,80	Lembaga, Laporan, Sistem Informasi	9.164	9.164	100,00
6838.Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	32.666.186.000,00	31.748.357.554,00	97,19	Lembaga	10.181	10.181	100,00
6843.Pengawasan Masa Kampanye Pemilu	5.879.403.000,00	4.787.635.616,00	81,43	Perkara, Laporan	1.199	1.199	100,00
6844.Pengawasan Masa Tenang	1.956.474.000,00	1.539.208.400,00	78,67	Perkara, Laporan	1.207	1.207	100
6845.Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara	13.327.699.000,00	12.402.948.107,00	93,06	Perkara, Laporan	10.178	10.178	100,00
6846.Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu	1.285.175.000,00	504.370.465,00	39,25	Perkara, Laporan	53	53	100,00

6847.Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota	119.400.000,00	19.942.100,00	16,70	Laporan	20	20	100,00
6848.Pengawasan Logistik	5.248.958.000,00	4.718.243.611,00	89,89	Perkara, Laporan	10.081	10.081	100,00
Total	106.711.174.000,00	85.676.819.287,00	80,29				

F. 5 Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK, BPKP, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

a. Terdapat Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan rincian sebagai berikut:

Unit	LHP	Nilai Temuan	Nilai TL	Nilai Belum TL	Persentase Atas Kerugian Negara	Persentase Atas Administrasi
Provinsi	BPK 2015	448.469.509,00	41.600.000,00	406.869.509,00	9,28%	100,00%

b. Pengembalian Sisa Dana Hibah Pilkada TA. 2015

Pada tanggal 04—14 September 2023, dilakukan audit kinerja oleh Inspektorat Wilayah III pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Bawaslu Kota Samarinda, dan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada kesempatan itu pula, tim reviu untuk Bawaslu Kota Samarinda melakukan tindak lanjut atas Sisa Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2015 a.n. Meity Landemeyke Torar. Pada tanggal 07 September 2023, telah diperbaharui surat pernyataan yang isinya antara lain:

- 1) Jumlah kerugian/kekurangan tersebut telah saya ganti dengan menyetorkan ke Kas Daerah secara bertahap dengan total senilai Rp41.600.000 pada tanggal 08 Maret 2018 sampai dengan 03 Januari 2023;
- 2) Jumlah kekurangan atas piutang senilai Rp406.859.509.000 akan diganti dalam jangka waktu 6 bulan (terhitung) dari tanggal 07 September 2023 s.d. 07 Maret 2024 dengan angsuran per bulan minimal Rp2.000.000 yang akan disetorkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima);

- 3) Sebagai jaminan atas pernyataan di atas, Ibu Meity Landemeyke Torar bersedia menyerahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut tanah dengan bukti status kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00527, pemegang hak milik Alexander Agustinus Rottie (Suami Ibu Meity Landemeyke Torar) luas 7.321 m² (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Meter Persegi) yang berlokasi di Desa Batu Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara dan buku bank BRI dan ATM a.n Meity Landemeyke Torar dengan nomor 7385-01-006266-53-4;
- 4) Dalam jangka waktu 6 bulan setelah Ibu Meity Landemeyke Torar menandatangani pernyataan tersebut, beliau akan menjual aset yang dijaminan tersebut pada poin nomor 3 (tiga) untuk melunasi sisa kerugian yang menjadi tanggungan beliau. Apabila hasil penjualan aset tersebut tidak cukup untuk melunasi sisa kerugian yang menjadi tanggungan beliau, maka beliau akan menjual aset lain yang dimiliki sehingga lunas. Ibu Meity Landemeyke Torar menjamin bahwa ahli waris atau pihak manapun tidak akan melakukan gugatan atau tuntutan hukum atau keberatan terhadap penggunaan uang dan/atau barang untuk menyelesaikan kerugian negara tersebut.

c. Tindak Lanjut Audit Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Tindak lanjut atas notisi hasil audit kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atas Pengelolaan Dana APBN Tahun Anggaran 2023 pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Bawaslu Kota Samarinda, dan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

1) Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

- Terdapat kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja, Uang Makan, Tunjangan Struktural, dan Tunjangan Fungsional a.n. Lely Febriyanti dan a.n. Jumiati. Atas hal tersebut, a.n. Lely Febriyanti telah melakukan pengembalian ke kas negara, sedangkan a.n. Jumiati telah membuat surat pertanggungjawaban mutlak untuk menyetor kelebihan/duplikasi pembayaran dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mulai bulan Januari s.d September 2023;
- Terdapat kelebihan pembayaran honorarium pengelola keuangan dengan total sebesar Rp21.868.000,00, seluruhnya telah dilakukan pengembalian ke kas negara;
- Terdapat kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar Rp45.518,00, seluruhnya telah dilakukan pengembalian ke kas negara;

- Terdapat kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar Rp35.150,00, seluruhnya telah dilakukan pengembalian ke kas negara;
- Terdapat kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp3.750.000,00, seluruhnya telah dilakukan pengembalian ke kas negara.

2) Bawaslu Kota Samarinda

- Terkait dengan tindak lanjut temuan pemeriksaan pada Bawaslu Kota Samarinda per 31 Juli 2023 yang berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 25c/HP/XIV/05/2017, masih terdapat rekomendasi dengan status “Belum Tuntas” sebanyak 1 (satu) temuan dengan total saldo senilai Rp406.869.509,00, Bawaslu Kota Samarinda telah melakukan pertemuan dengan Sdri. Meity Landemeyke Torar selaku BP Panwas Kota Samarinda Tahun 2015. Dalam pertemuan tersebut, Sdri. Meity Landemeyke Torar membuat SKTJM dan menyerahkan buku tabungan serta Kartu ATM.
- Terdapat kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar Rp716.625,00, seluruhnya telah dilakukan pengembalian ke kas negara.

3) Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara

- Terdapat kekurangan kursi sebanyak 5 (lima) unit pada Sewa Meubelair Panwaslu Kecamatan Sebulu, atas hal tersebut telah dilakukan penyeteroran kembali ke kas negara sebesar 5 kurs x Rp50.000,00 x 6 bulan dengan total sebesar Rp1.500.000,00;
- Terdapat kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar Rp84.375,00, seluruhnya telah dilakukan pengembalian ke kas negara.

d. Hasil Reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (BPKP)

Berdasarkan Hasil Reviu atas Pertanggungjawaban Keuangan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada periode Semester I Tahun 2024 (1 Januari s.d. 30 Juni 2024) pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, terdapat catatan antara lain:

- 1) Terdapat pertanggungjawaban anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan Tahun 2024 yang belum sesuai ketentuan itu pada Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Tahun 2024 terdapat kelebihan pembayaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebesar Rp4.293.000,00;

- 2) Tidak terdapat aturan atau dasar hukum dalam pengenaan tarif honorarium yang sudah dibayarkan bagi staf pengelola keuangan pada Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pembayaran uang harian perjalanan dinas bagi PPNPN.

F.6 Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai. Bawaslu telah mengimplementasikan PIPK tersebut dengan telah menentukan akun signifikan yaitu:

1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran;
2. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah;
3. Peralatan dan Mesin; dan
4. Beban Perjalanan Dinas Biasa.

Selanjutnya, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan Penilaian Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan melakukan penilaian terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas. Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi. Berdasarkan hasil penilaian tersebut Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tidak ada temuan, baik kelemahan material, kelemahan signifikan maupun kelemahan yang berdampak rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah efektif.